



LAPORAN TAHUNAN

PUSAT PENYULUHAN

TAHUN 2021

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



LAPORAN TAHUNAN

PUSAT PENYULUHAN

TAHUN 2021

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pusat Penyuluhan Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan Tahunan Tahun 2021 ini disusun sebagai pertanggungjawaban administratif Satker Pusat Penyuluhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pertanggungjawaban terhadap DIPA Satker Pusat Penyuluhan Tahun 2021.

Laporan ini memuat uraian tentang gambaran umum, perencanaan kinerja, pelaksanaan kegiatan penyuluhan baik pelaksanaan fisik kegiatan maupun anggaran, permasalahan yang dihadapi serta upaya tindak lanjut. Laporan disusun dengan harapan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di masa mendatang.

Atas tersusunya laporan ini disampaikan ucapan terima kasih terhadap semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu mulai dari persiapan sampai dengan selesainya laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam upaya penyuluhan dan pendampingan terhadap pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Jakarta, 31 Januari 2022

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Mariana Lubis, M.M.

NIP. 19621112 199101 2 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas dan Fungsi.....	3
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Dukungan SDM.....	5
E. Dukungan Sarana Prasarana.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	8
B. Target Rencana Strategis.....	9
C. Rencana Kerja dan RKAKL Tahun 2021.....	10
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PUSAT PENYULUHAN.....	11
A. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.....	12
B. Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan.....	13
1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran.....	13
a. Penyusunan Dokumen Renja Pusat Penyuluhan.....	13
b. Penyusunan Dokumen RKAKL Pusat Penyuluhan.....	15
c. Penyusunan Program Penyuluhan.....	17
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.....	18
a. Penyusunan LKj Satker Pusat Penyuluhan Tahun 2020.....	18
b. Penyusunan Statistik Pusat Penyuluhan Tahun 2020.....	18
c. Evaluasi BMN Pusat Penyuluhan.....	19
d. Pelaksanaan Tata Usaha dan Administrasi.....	19
e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan.....	20
f. Penyusunan SPIP Pusat Penyuluhan.....	22
3. Operasional dan Pemeliharaan Kantor.....	22
4. Pelayanan Umum dan Perlengkapan.....	22
a. Penyaluran Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) Kehutanan.....	22
5. Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluhan.....	25
a. Identifikasi potensi dan kebutuhan peningkatan kapasitas Penyuluhan Kehutanan.....	25
b. Penyusunan dan Penggandaan Modul Pembelajaran.....	28
c. Temu Teknis Penyuluhan Kehutanan PNS dan Non Aparatur Berbasis Komoditas.....	28
d. Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur.....	33
6. Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluhan (PEN).....	35
7. Pembentukan dan Pembinaan KTH Mandiri.....	40
a. Pendampingan kelompok tani desa-desa hutan menuju KTH Mandiri.....	40
8. Pembentukan dan Pengembangan LP2UKS (Wanawiyata Widyakarya).....	41
a. Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya.....	41
b. Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya.....	42
c. Penyusunan Kurikulum Pemagangan Wanawiyata Widyakarya.....	44
9. Metode Materi Penyuluhan.....	45
a. Sekolah Lapang.....	45
b. Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2021.....	46
c. Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2021.....	47
d. Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik.....	49
e. Penerbitan Majalah Kenari.....	51
BAB IV PENUTUP.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Peta Jabatan Pusat Penyuluhan.....	5
Tabel 1.2.	Aset BMN Pusat Penyuluhan.....	6
Tabel 2.1.	Kegiatan Pusat Penyuluhan pada Prioritas Nasional 3.....	8
Tabel 2.2.	Target Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020 - 2024.....	9
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Kegiatan dan Elemen Kegiatan pada Dokumen Renja Pusat Penyuluhan Tahun 2021.....	10
Tabel 3.1.	Indikator Kerja Kegiatan (IKK) dan Target Renstra Satker Pusat Penyuluhan.....	13
Tabel 3.2.	Kronologis Revisi Anggaran DIPA APBN Sub Satker Pusat Penyuluhan TA 2021.....	16
Tabel 3.3.	Rencana Kegiatan Program Penyuluhan Kehutanan 2022.....	17
Tabel 3.4.	Rekapitulasi progres hibah kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang dipergunakan oleh Penyuluh Kehutanan Provinsi.....	19
Tabel 3.5.	Sebaran Penyuluh Kehutanan penerima BOP dan sebaran Kelompok Tani Hutan di 33 provinsi.....	24
Tabel 3.6.	Sebaran PKSM Berdasarkan Provinsi.....	34
Tabel 3.7.	Sebaran PKS Berdasarkan Provinsi.....	34
Tabel 3.8.	Daftar Kelompok Perhutanan Sosial & Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Sasaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021....	36
Tabel 3.9.	Data Pendamping Kelompok Perhutanan Sosial & Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Sasaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Tahun 2021.....	4
Gambar 3.1.	Realisasi Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2021.....	12
Gambar 3.2.	Capaian Eksekutif pada Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2020.....	18
Gambar 3.3.	Sebaran Penyuluh Kehutanan PNS penerima BOP tahun 2021 di 33 provinsi.....	23
Gambar 3.4.	Grafik Data Jumlah KTH yang didampingi oleh setiap Penyuluh Kehutanan.....	26
Gambar 3.5.	Grafik Hasil Survey Kelompok Berdasarkan Skema Pengelolaan Hutan.....	26
Gambar 3.6.	Grafik Komoditas yang diusahakan dan dikembangkan oleh Kelompok Tani Hutan.....	26
Gambar 3.7.	Grafik Hasil Survey Permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Tani Hutan.....	27
Gambar 3.8.	Grafik Hasil Survey Kebutuhan Pelatihan yang diinginkan oleh Penyuluh Kehutanan.....	27
Gambar 3.9.	Metode pelaksanaan kegiatan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan berbasis komoditas.....	28
Gambar 3.10.	Infografis waktu pelaksanaan, jumlah peserta dan materi di setiap regional wilayah kegiatan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan.....	29
Gambar 3.11.	Grafik Komoditas yang diusahakan oleh KTH/PKSM.....	30
Gambar 3.12.	Grafik Permasalahan yang dihadapi oleh KTH/PKSM.....	30
Gambar 3.13.	Grafik Hasil Survey Kebutuhan Pelatihan yang diinginkan oleh PKSM.....	31
Gambar 3.14.	Grafik Kesesuaian Materi dengan Kebutuhan Peserta (PKSM).....	32
Gambar 3.15.	Komoditas unggulan PKSM.....	33
Gambar 3.16.	Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sasaran pendampingan PEN 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah.....	37
Gambar 3.17.	Grafik Komoditas Usaha yang diusahakan oleh masing-masing KUPS.....	38
Gambar 3.18.	Jumlah KTH Mandiri pada Setiap Provinsi dan Komoditas yang Dikembangkan.....	40
Gambar 3.19.	KTH penerima fasilitasi pembentukan LP2UKS beserta komoditas yang diusahakannya.....	42
Gambar 3.20.	KTH penerima fasilitasi pengembangann LP2UKS.....	43





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya pengembangan kualitas masyarakat di dalam dan sekitar hutan merupakan langkah penting yang harus ditempuh. Masyarakat harus mandiri dan berdaya saing untuk dapat menjadi objek sasaran sekaligus pelaku dari pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Berangkat dari hal ini, penyuluhan memiliki peran yang sangat strategis dan tidak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri karena melalui penyuluhanlah masyarakat dapat dibentuk sesuai dengan tujuan pembangunan. Penyuluhan kehutanan diposisikan sebagai ujung tombak dalam setiap aktivitas pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan karena merupakan bagian integral pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sehingga harus terstruktur, terencana, memiliki kelembagaan, dilaksanakan dan dikembangkan secara terus menerus agar tercapai tujuan pembangunan yaitu masyarakat sejahtera dengan mempertahankan kelestarian lingkungan dan hutan.

Dalam rangka mendukung dan memastikan tercapainya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, Pusat Penyuluhan dalam kerangka organisasi di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM telah menyusun Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2021. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut Pusat Penyuluhan menyusun Laporan Tahunan Pusat Penyuluhan Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada.

Laporan Tahunan Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2021 merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, perkembangan dan hasil yang telah dicapai oleh Pusat Penyuluhan dalam periode satu tahun. Maksud disusunnya Laporan Tahunan 2021 adalah sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan Satuan Kerja Pusat Penyuluhan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan selama tahun 2021. Tujuannya adalah untuk menyajikan data dan informasi yang merupakan evaluasi pencapaian hasil kegiatan penyuluhan kehutanan baik fisik maupun keuangan sebagai bahan masukan untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan di masa mendatang. Laporan Tahunan ini berisi uraian menyeluruh mengenai kondisi sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana), hasil output kegiatan, pencapaian kinerja dan permasalahan dan saran tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan satker.

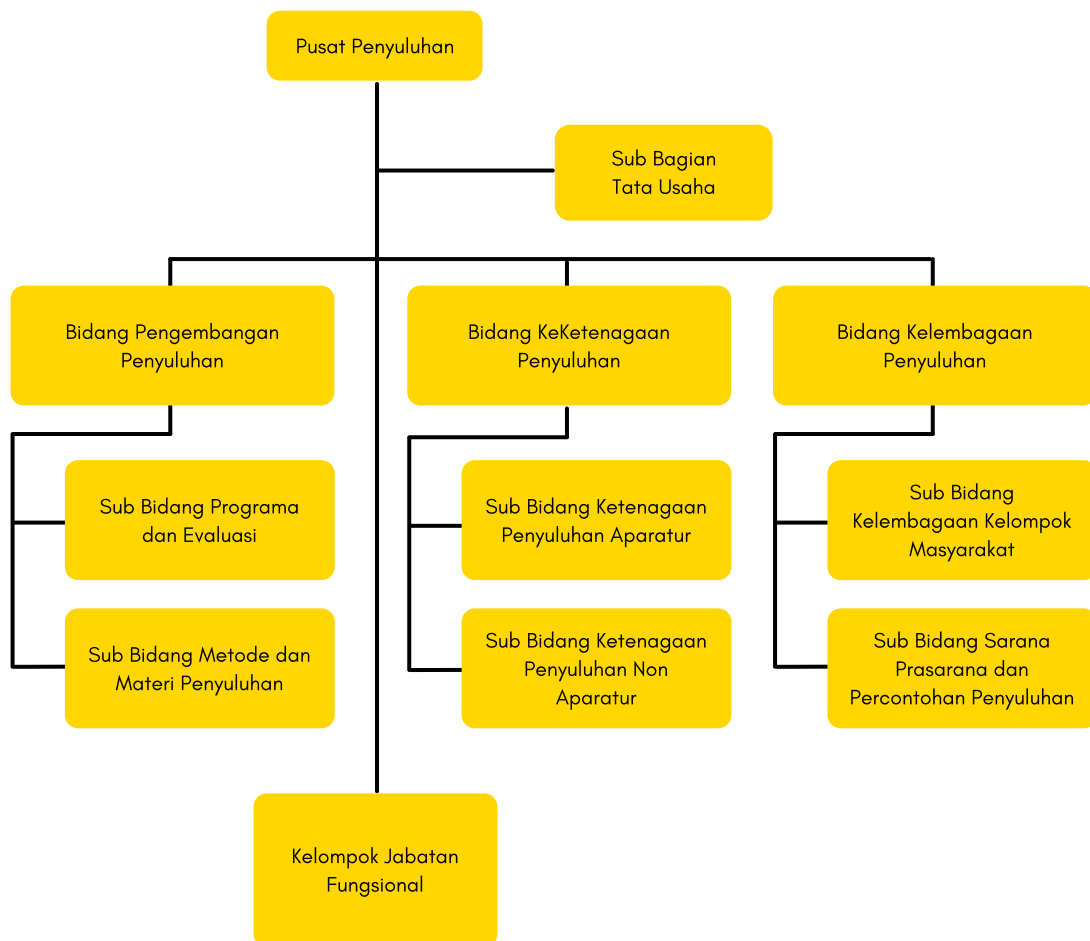
B. TUGAS DAN FUNGSI

Pusat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
2. Penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
4. Bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan administrasi Pusat.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pusat Penyuluhan pada tahun anggaran 2021 masih mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan proses penyetaraan jabatan fungsional diselesaikan. Pusat penyuluhan berkedudukan sebagai Eselon II yang dikepalai oleh Kepala Pusat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2021 Pusat Penyuluhan masih dibantu oleh 3 Pejabat Administrator dan 6 Pejabat Pengawas, serta Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana struktur organisasi pada Gambar 1.1.

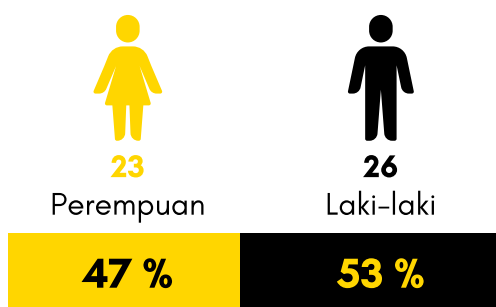


Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Tahun 2021.

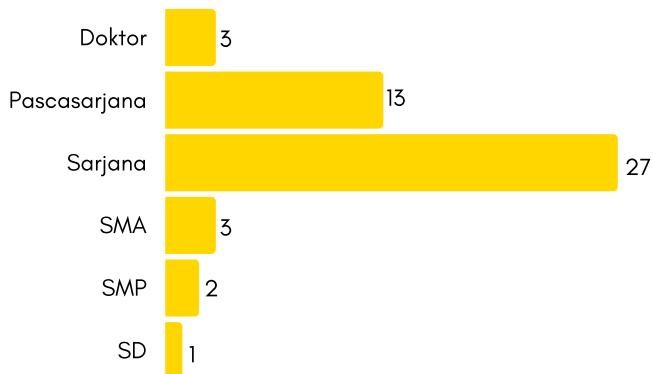
D. DUKUNGAN SDM

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target kinerja, pada tahun 2021 Pusat Penyuluhan didukung oleh 49 orang pegawai baik PNS maupun PPNN dengan sebaran sebagai berikut:

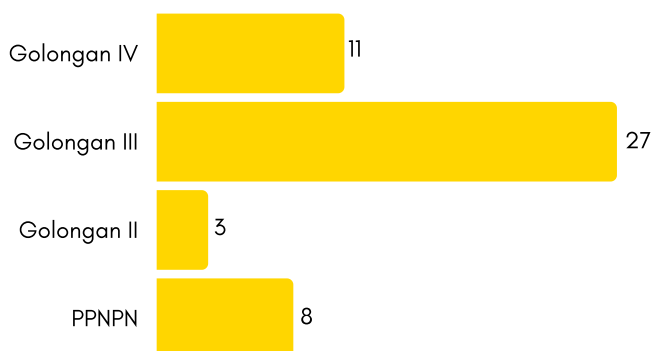
Jenis kelamin



Pendidikan



Golongan



Tabel 1.1. Peta Jabatan Pusat Penyuluhan.

No	Nama Jabatan	Jumlah
I	Pusat Penyuluhan	19
1	Kepala Pusat Penyuluhan	1
2	Penyuluh Kehutanan Ahli Utama	1
3	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	7
4	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	4
5	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	6
I	Bidang Pengembangan Penyuluhan	6
1	Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan	1
2	Kepala Sub Bidang Metode dan Materi	1
3	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi	1
4	Analisis Metode	1
5	Staf PPNN	2
II	Bidang Ketenagaan Penyuluhan	8
1	Plt. Kepala Bidang Ketenagaan Penyuluhan	1
2	Kepala Sub Bidang Ketenagaan Penyuluh Aparatur	1
3	Kepala Sub Bidang Ketenagaan Penyuluh Non Aparatur	1
4	Analisis Kapasitas Penyuluh	4
5	Staf PPNN	1
III	Bidang Kelembagaan Penyuluhan	4
1	Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan	1
2	Plt. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1
3	Plt. Kepala Sub Bidang Sarana, Prasarana, dan Percontohan Penyuluhan	1
4	Analisis Kelembagaan Masyarakat	1
IV	Sub Bagian Tata Usaha	12
1	Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
2	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1
3	Analisis Keuangan	1
4	Bendahara	1
5	Verifikator Keuangan	1
6	Pengelola Barang Milik Negara	1
7	Pengadministrasi Umum	1
8	Staf PPNN	5
	JUMLAH	49

E. DUKUNGAN SARANA PRASARANA

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusat Penyuluhan memiliki aset sarana prasarana atau Barang Milik Negara (BMN). Aset yang dikelola oleh Pusat Penyuluhan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Aset BMN Pusat Penyuluhan.

Kode Barang	Jenis Barang	Jumlah Unit	Baik	Kondisi Rusak Ringan	Rusak Berat
3020101001	Jeep	1	1	-	-
3020104001	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	10	10	-	-
3020104001	Sepeda Motor	1.537	1.537*	-	-
3050104001	Lemari Besi Metal	12	12		
3050104002	Lemari Kayu	5	5		
3050104004	Rak Kayu	9	-	-	9
3050104005	Filling Cabinet Besi	5	5		
3050104007	Brandkas	5	-	5	-
3050104009	Kardex Besi	15	12	-	3
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	1	-	-	1
3050105010	White Board	4	3	-	1
3050105048	LCD Projector/Infocus	2	-	-	2
3050201002	Meja Kerja Kayu	48	48	-	-
3050201003	Kursi Besi/Metal	94	47	-	47
3050201008	Meja Rapat	14	14	-	-
3050201009	Meja Komputer	14	14	-	-
3050204001	Lemari Es	2	2	-	-
3050204004	AC Portable	4	4	-	-
3050204004	AC Split	6	6	-	-
3050206002	Televisi	2	2	-	-
3050206021	Tustel	1	1	-	-
3050206021	Dispenser	1	1	-	-
3050206046	Handycam	1	-	1	-
3050206058	Gordyn/Kray	1	1	-	-
3050206068	DVD Player	2	-	2	-
3060102128	Camera Digital	3	3	-	-
3060102163	Duplicator DVD	1	1	-	-
3060105038	GPS Receiver	5	5	-	-
3060201001	Telephone (PABX)	1	1	-	-
3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	3	2	-	1
3060201010	Facsimile	1	1	-	-
3060405001	Message Switching Center (MSC)	1	1	-	-
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	1	1	-	-
3100102001	PC Unit	39	32	-	7
3100102002	Laptop	44	33	-	11
3100102002	Personal Komputer Lainnya (IPAD)	7	4	-	3
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	17	8	-
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	4	-	6
3100203010	CD Writer	1	1	-	-

*) Merupakan kendaraan roda dua pengadaan tahun 2006, 2007, 2010 dan 2013 yang berada di dinas kabupaten/provinsi yang saat ini dalam proses hibah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024, terdapat 7 Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional dan pada tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan dalam 4 Prioritas Nasional, yaitu :

- PN-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
- PN-2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
- PN-3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
- PN-6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Sejalan dengan arah kebijakan perencanaan dan penganggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan P2SDM mendukung 3 (tiga) PN yaitu: PN-1, PN-3 dan PN-6. Adapun kegiatan pada Pusat Penyuluhan termasuk ke dalam PN-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan Prioritas Keberantaraan Usaha dan Dampak Sosial, Proyek Prioritas Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan.

Tabel 2.1. Kegiatan Pusat Penyuluhan pada Prioritas Nasional 3.

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK K/L	INDIKATOR
Pengentasan Kemiskinan	Keperantaraan Usaha dan Dampak Nasional	Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	Pembentukan KTH Mandiri untuk pengembangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat	Jumlah KTH Mandiri
			Pembentukan Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) bagi masyarakat	Jumlah Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) yang terbentuk
				Pengembangan Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sebagai lembaga pelatihan terakreditasi
			Peningkatan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal bagi kelompok masyarakat	Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal

B. TARGET RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mencapai target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN serta sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian LHK 2020 - 2024 dan Rencana Strategis Badan P2SDM, Pusat Penyuluhan mendukung program Badan P2SDM pada Prioritas Nasional 3 (PN-3) yang dilakukan melalui program prioritas "Pengentasan Kemiskinan" melalui kegiatan "Penyuluhan dan/atau pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan" yang memiliki sasaran meningkatnya daya saing pelaku utama dan pelaku usaha menuju masyarakat yang mandiri. Kegiatan dan sasaran Pusat Penyuluhan ini telah disesuaikan dengan penyesuaian arsitektur kinerja Kementerian LHK sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan pada Pusat Penyuluhan di Tahun 2021 memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu :

1. Jumlah penyuluh dan/atau pendamping handal
2. Jumlah Kelompok Tani Hutan Mandiri
3. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya)
4. Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS

Adapun target masing-masing IKK sesuai dengan RPJMN dan Renstra Tahun 2020 - 2024 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Target Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020 - 2024.

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyuluh dan/atau pendamping handal	Orang	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
2	Jumlah Kelompok Tani Hutan Mandiri	Unit	100	200	300	400	500
3	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya)	Unit	10	20	30	40	50
4	Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS	Unit	0	160	180	210	250

C. RENCANA KERJA DAN RKAKL TAHUN 2021

Dalam kerangka rencana tahunan, indikator kinerja pada Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja yang selanjutnya diturunkan dalam DIPA Pusat Penyuluhan. Setiap indikator kinerja mempunyai elemen kegiatan dengan output-output kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator kinerja. Adapun elemen-elemen kegiatan pada setiap target kinerja disajikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Kegiatan dan Elemen Kegiatan pada Dokumen Renja Pusat Penyuluhan Tahun 2021.

Indikator Kegiatan	Elemen Kegiatan
Kapasitas Penyuluh dan/atau Pendamping yang Handal	Identifikasi potensi dan kebutuhan peningkatan kapasitas Penyuluh
	Penyusunan dan Penggandaan Modul Pembelajaran
	Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Jawa via Online
	Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Sumatera via Online
	Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Kalimantan via Online
	Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Sulawesi via Online
	Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah BaliNusraMalukuPapua via Online
	Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur
	Temu Teknis PKSM Komoditas Aren
	Temu Teknis PKSM Komoditas Bambu
	Sekolah Lapang
	Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2021
	Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2021
	Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik
	Penerbitan Majalah Kenari
Kapasitas Penyuluh dan/atau Pendamping yang Handal (PEN)	Pelaksanaan Pendampingan Kelompok Tani PS dan Agroforestry
	Asistensi Pendampingan
KTH Mandiri yang terbentuk	Pendampingan Kelompok Tani Desa-Desa Hutan Menuju KTH Mandiri
Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya	Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya
	Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya
	Penyusunan Kurikulum Pemagangan Wanawiyata Widyakarya
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Penyusunan Dokumen Renja Pusat Penyuluhan
	Penyusunan Dokumen RKAKL Pusat Penyuluhan
	Penyusunan Program Penyuluhan
	Penyusunan LKj Satker PUSLUH Tahun 2020
	Penyusunan Statistik Penyuluhan
	Evaluasi BMN Pusat Penyuluhan
	Pelaksanaan Tata Usaha dan Administrasi
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan
	Penyusunan SPIP Pusat Penyuluhan
	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PUSAT PENYULUHAN

A. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2021

Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan pada awal Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.20.565.033.000,-, kemudian pada tahun berjalan terdapat refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, sehingga Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan menjadi Rp.17.010.098.000,-. Secara lebih rinci pagu dan realisasi anggaran disajikan sebagaimana Tabel 3.1.



Gambar 3.1. Realisasi Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2021.

B. REALISASI PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN

1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

a. Penyusunan Dokumen Renja Pusat Penyuluhan

Dalam rangka menyediakan kerangka kerja dan pembiayaan Kegiatan Pusat Penyuluhan selama satu tahun, pada tahun 2021 Pusat Penyuluhan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang berisi Komponen kegiatan dan Sub Komponen Kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang (T+1). Renja juga merupakan penjabaran dari Target Indikator Kinerja yang tertuang dalam Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024.



Renja Pusat Penyuluhan Tahun 2022

Setiap indikator kinerja dalam Renstra diturunkan menjadi unit kegiatan dan elemen kegiatan dengan output-output kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator kinerja. Adapun elemen-elemen kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Indikator Kerja Kegiatan (IKK) dan Target Renstra Satker Pusat Penyuluhan.

No.	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO TA.2021	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
1.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	(EAB) Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	Penyusunan rencana program dan anggaran	Penyusunan Dokumen Renja Pusat Penyuluhan
						Penyusunan Dokumen RKAKL Pusat Penyuluhan
						Penyusunan Programa Penyuluhan
						Penyusunan LKj Satker PUSLUH Tahun 2022
						Evaluasi BMN Pusat Penyuluhan
						Pelaksanaan Tata Usaha dan Administrasi
						Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan
						Penyusunan SPIP Pusat Penyuluhan
						Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan

No.	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO TA.2021	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN						
2.	Peningkatan Penyuluhan	(QDC) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	1700 Orang	Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluhan	Identifikasi potensi potensi dan kebutuhan peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan
						Penyusunan dan Penggandaan Modul Pembelajaran
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Jawa via Online
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Sumatera via Online
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Kalimantan via Online
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Sulawesi via Online
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Wilayah Bali Nusra Maluku Papua via Online
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan UPT KLHK
						Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur
						Temu Teknis PKSM berbasis Komoditas
						Temu Teknis PKSM Jasa Lingkungan
					Metode dan Materi Penyuluhan	Sekolah Lapang
						Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2022
						Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2022
						Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik
						Penerbitan Majalah Kenari

No.	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO TA.2021	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
		(QDD) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	KTH Mandiri yang terbentuk	90 Kelompok Masyarakat	Pembentukan dan Pembinaan KTH Mandiri	Pendampingan kelompok tani desa-desa hutan menuju KTH Mandiri
			Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan	50 Kelompok Masyarakat	Pembentukan dan Pengembangan LP2UKS (Wanawiyata Widyakarya)	Fasilitasi pembentukan wanawiyata widyakarya
						Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya



Kerajinan Batik *Eco-print* oleh KTH Mandiri
KTH Wiji Dadi, Kebumen.

b. Penyusunan Dokumen RKAKL Pusat Penyuluhan

Sebagai acuan kerangka kerja, perkiraan pembiayaan dan capaian fisik pada kegiatan Peningkatan Penyuluhan, Pusat Penyuluhan pada tahun 2021 melaksanakan kegiatan penyusunan RKA-K/L. Kegiatan ini meliputi kegiatan penyusunan RKA-K/L Tahun 2022 dan penyusunan revisi/perubahan RKA-KL Tahun 2021.

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP DIPA-029.08.1.465019/2021 tanggal 23 November 2020, Pagu Pusat Penyuluhan Tahun 2022 sebesar Rp.20.621.842.000,- dan selama tahun 2021 terjadi 10 kali perubahan anggaran yang dijelaskan sebagaimana pada Tabel 3.2.

Pagu anggaran kegiatan penyusunan RKA-K/L Pusat Penyuluhan tahun 2022 yaitu Rp. 26.795.000,- dengan realisasi anggaran kegiatan yaitu Rp. 26.786.700,- atau sebesar 99,96%.

Tabel 3.2. Kronologis Revisi Anggaran DIPA APBN Sub Satker Pusat Penyuluhan TA 2021.

No	Uraian	Pagu (Rp)	Nomor Pengesahan
1	DIPA APBN	20.565.033.000	SP DIPA.029.08-1.465019/2021
			Tanggal 23 November 2021
2	DIPA APBN	17.234.508.000	SP DIPA.029.08-1.465019/2021
	Revisi ke 01 - DJA	Refocusing belanja RM Non Operasional sebesar Rp. 3.330.535.000,- untuk pelaksanaan pengadaan vaksinasi nasional, penanganan COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial serta percepatan PEN	Tanggal 16 Februari 2021
3	DIPA APBN	17.234.508.000	SP DIPA.029.08-1.465019/2021
	Revisi ke 02 - DJA	Revisi dalam rangka buka blokir atas belanja modal dan belanja bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah (526)	Tanggal 25 Maret 2021
4	DIPA APBN	17.234.508.000	SP DIPA.029.08-1.465019/2021
	Revisi ke 03 - Kanwil DJPB	Revisi realokasi anggaran belanja PEN dengan penandaan food estate	Tanggal 26 April 2021
5	DIPA APBN	17.234.508.000	SP DIPA.029.08-1.465019/2021
	Revisi ke 04 - DJA	Refocussing /Realokasi Tahap II: Pengurangan Belanja Pegawai untuk Pengadaan vaksin COVID-19 serta percepatan PEN pada Kantor Pusat BP2SDM	Tanggal 31 Mei 2021
6	DIPA APBN	16.934.508.000	SP DIPA.029.08-1.465019/2021
	Revisi ke 05 - DJA	Refocusing tahap III. Pengurangan sebesar Rp.300.000.000,- pada layanan Dukman	Tanggal 21 Juli 2021
7	DIPA APBN	16.784.508.000	SP DIPA.029.08-1.465019/2021
	Revisi ke 06 - DJA	Refocusing Tahap IV berupa pengurangan belanja pegawai pada Sekretariat Badan sebesar Rp 150.000.000,- dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial	Tanggal 4 Agustus 2021
		(Refocusing dan realokasi anggaran pada Belanja Ops dan Non Ops)	
8	DIPA APBN	16.784.508.000	SP DIPA.029.08-1.465019/2021
	Revisi ke 07 - DJA	Realokasi anggaran belanja pegawai pada Kantor Pusat BP2SDM sebesar Rp.1.000.000.000,- dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja pegawai Unit Eselon I lain yaitu Dirjen Penegakan Hukum LHK.	Tanggal 16 Agustus 2021
9	DIPA APBN	17.010.098.000	SP DIPA.029.08-1.465019/2021
	Revisi ke 08 - Direktorat PA	Revisi pergeseran kelebihan anggaran belanja pegawai ke belanja operasional terkait penanganan Covid-19 sebesar Rp 225.590.000,-	Tanggal 22 Oktober 2021
10	DIPA APBN	17.010.098.000	SP DIPA.029.08-1.465019/2021
	Revisi ke 09 - Kanwil DJPb	Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA	Tanggal 2 November 2021
11	DIPA APBN	17.010.098.000	SP DIPA.029.08-1.465019/2021
	Revisi ke 10 - Kanwil DJPb	Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA	Tanggal 18 November 2021

c. Penyusunan Program Penyuluhan

Programa penyuluhan tahun 2022 disusun sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) bagi para Penyuluh Kehutanan di pusat Tahun 2022 dan sekaligus sebagai bahan perencanaan penyusunan anggaran tahun 2022.

Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2022 ini disusun berdasarkan kondisi terkini sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya penunjang serta analisis permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai.

Programa Penyuluhan disahkan oleh Kepala Badan P2SDM, Kepala Pusat Penyuluhan bersama dengan Koordinator Penyuluh Kehutanan Ahli Pusat Penyuluhan pada bulan April 2021. Sesuai matriks



Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2022

programa penyuluhan kehutanan nasional tahun 2022, terdapat 16 rencana kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan yang tertuang pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Rencana Kegiatan Program Penyuluhan Kehutanan 2022.

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Menyusun Program Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2022	Januari – April 2022
2	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan (RKTPK) Tahun 2023	Januari 2023
3	Lomba Wana Lestari Tahun 2022	Juni – Agustus 2022
4	Temu Karya Pemenang Lomba Tahun 2022	Agustus 2022
5	Materi : • Penyusunan dan penilaian Angka Kredit sesuai P.73/2020	Januari – Desember 2022

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
	- Sosialisasi PermenPAN 73/2020 dan Juknisnya - GIS - Multimedia dan teknik penulisan di Media Cetak maupun Media Online	-
6	Evaluasi kegiatan pendampingan PEN Provinsi Kalimantan Tengah	-
7	Penyusunan Modul Sekolah Lapang dengan topik/tema: - Mangrove - Aren	-
8	Evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan	Januari – Desember 2022
9	Penyusunan Kode Etik dan Kode Prilaku Profesi Penyuluh Kehutanan	-
10	Kunjungan ke KTH, Evaluasi Online	April – Desember 2022
11	Menyusun Panduan Monev Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS	Januari – Maret 2022
12	Membuat tulisan atau Infografis berupa Leaflet atau brosur tentang KTH/KUPS/ serta penyuluh kehutanan unggulan yang akan dipublikasikan dengan media cetak, elektronik maupun online	Januari – Desember 2022
13	Pembuatan sarana penyuluhan kehutanan berbasis elektronik (studio mini)	Januari – Desember 2022
14	Pembuatan materi penyuluhan media cetak dan elektronik : - Food Estate - Mangrove - Karbon - Persemaian Modern - Adaptasi Iklim, Proklamasi dan Climate Resilience	-
15	Pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi kegiatan penyuluhan kehutanan	Januari – Desember 2022
16	Pengembangan aplikasi forestamart menjadi aplikasi berbasis android yang terdaftar di playstore dan appstore	Januari – Desember 2022

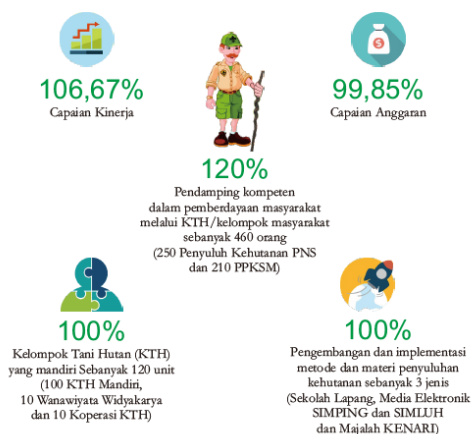
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

a. Penyusunan LKj Satker Pusat Penyuluhan Tahun 2020

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan yang disusun pada Tahun 2021 memuat informasi pencapaian kinerja yang pada hakikatnya merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2020 dengan realisasi pada tahun tersebut.

Di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dengan Kepala Pusat Penyuluhan, memuat 3 indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu: (1) Jumlah Kelompok Tani Hutan Mandiri; (2) Jumlah Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat; dan (3) Pengembangan dan implementasi metode dan materi penyuluhan kehutanan.

Kinerja Pusat Penyuluhan pada tahun 2020 terhadap 3 (tiga) IKK tersebut tercapai 106,67% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,85 %. Efisiensi capaian kinerja terhadap penggunaan anggaran tahun 2019 bernilai 1,06, sedangkan efektifitas capaian kinerja belum dapat diukur dikarenakan tahun 2020 merupakan tahun awal berjalannya Resnstra 2020-2024.



Gambar 3.2. Capaian Eksekutif pada Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2020.



Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan 2020

b. Penyusunan Statistik Pusat Penyuluhan Tahun 2020

Statistik Pusat Penyuluhan yang disusun pada Tahun 2021 memuat beberapa data seperti target dan capaian kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2020, kondisi penyuluh kehutanan baik PNS, PKSM, Penyuluh Kehutanan Swasta, serta pendampingan program PEN di Kalimantan Tengah. Selain itu, memuat data instansi pelaksana penyuluhan di daerah, data dan sebaran KTH berdasarkan kelas, data dan sebaran Wanawiyata Widyakarya, data dan sebaran koperasi KTH dan kelompok binaan fasilitasi Pusat Penyuluhan dengan mayoritas anggota kelompok wanita. Kemudian Statistik Pusat Penyuluhan tahun 2020 juga memuat peraturan perundang-undangan terkait penyuluhan dan materi penyuluhan tahun 2020.

Statistik Pusat Penyuluhan diterbitkan pada bulan April tahun 2021 dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan dan pihak lain yang berkaitan dengan penyuluhan.



Statistik Pusat Penyuluhan 2020

Pagu Anggaran kegiatan penyusunan LKj Pusat Penyuluhan Tahun 2020 yaitu Rp.39.870.000,-, realisasi anggaran kegiatan yaitu Rp.39.852.710,- atau 99,95%.

Pagu Anggaran kegiatan penyusunan Statistik Pusat Penyuluhan Tahun 2020 yaitu Rp.37.570.000,-, realisasi anggaran kegiatan yaitu Rp.37.566.500,- atau 99,99%.

c. Evaluasi BMN Pusat Penyuluhan

Evaluasi kegiatan pengelolaan dan penatausahaan BMN ini meliputi kegiatan penatausahaan BMN di Pusat Penyuluhan (inventarisasi, pencatatan, penilaian aset dan penghapusan) BMN di kantor Pusat Penyuluhan dan penyelesaian hibah kendaraan bermotor Penyuluh Kehutanan.

Tujuan dari upaya pemerintah melakukan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) adalah ingin mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Sedangkan sasarannya adalah Semua barang milik Negara agar tercatat dengan baik dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai.

Pada tahun 2006, 2007, 2010 dan 2013 terdapat kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda 2 bagi Penyuluh Kehutanan melalui serah terima dengan Dinas Kehutanan Kabupaten. Kendaraan dinas tersebut masih tercatat sebagai aset di Pusat Penyuluhan dan belum seluruhnya diserahkan sebagai hibah ke Pemerintah daerah sehingga masih dibutuhkan evaluasi proses penyelesaian hibahnya. Daftar hibah kendaraan bermotor roda dua yang telah diselesaikan pada Tahun 2020 disajikan secara rinci sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Rekapitulasi progres hibah kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang dipergunakan oleh Penyuluh Kehutanan Provinsi.

No	Provinsi	Jumlah Kendaraan	Keterangan
1	Lampung	11 Unit	Proses penerbitan hibah di Biro Umum
2	Banten	14 Unit	Proses Penerbitan BAST & naskah hibah
3	Jawa Barat	36 Unit	Selesai serah terima BPKB kendaraan
4	Jawa Tengah	68 Unit	Proses penandatanganan BAST & naskah hibah di Dinas Provinsi Jawa Tengah
5	Jawa Timur	105 Unit	Proses penerbitan BAST & naskah hibah

Laporan BMN ini diterbitkan pada Desember tahun 2021 dan memuat hasil pelaksanaan hibah kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang dipergunakan oleh Penyuluh Kehutanan Provinsi sampai dengan 31 Desember 2021.



Laporan Evaluasi Kegiatan BMN Pusat Penyuluhan

Pagu Anggaran kegiatan Evaluasi BMN Pusat Penyuluhan yaitu Rp.31.110.000,- , realisasi anggaran kegiatan yaitu Rp.31.106.689,- atau 99,98%.

d. Pelaksanaan Tata Usaha dan Administrasi

Tata Usaha merupakan segenap aktifitas menghimpun, mencatat, mengolah mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Salah satu tugas dari tata usaha adalah surat menyurat, dan prosodur pengolahan surat dimasing-masing unit organisasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Sumber data atau informasi yang bermanfaat untuk kemajuan organisasi tersebut adalah surat.

Pelaksanaan tata usaha dan administrasi dimaksudkan untuk kelancaran pekerjaan kantor dan mencegah kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan, mengurangi keterlambatan atau hambatan dalam pengangendaan surat masuk maupun surat keluar, kontrol yang lebih baik terhadap pekerjaan dan mengetahui jumlah surat masuk maupun surat keluar yang ada di satuan kerja Pusat Penyuluhan. Sedangkan tujuannya adalah untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas, terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum dan terciptanya birokrasi modern yang efektif dan efisien.

Berdasarkan data Laporan Persuratan Tahun 2021 surat masuk Pusat Penyuluhan pada bulan Januari s/d Desember 2021 sebanyak 666 surat dan surat keluar Pusat Penyuluhan sebanyak 992 surat.



Laporan Penatausahaan Persuratan

Pagu Anggaran kegiatan Pelaksanaan Tata Usaha dan Administrasi yaitu Rp.371.365.000,- , realisasi anggaran kegiatan yaitu Rp.371.315.545,- atau 99,98%.

Pada tahun 2021, terdapat revisi pergeseran kelebihan anggaran belanja pegawai pada Badan P2SDM ke belanja operasional penanganan Covid-19 dengan Pusat Penyuluhan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 321.365.000,-. Belanja operasional penanganan pandemi Covid-19 tersebut digunakan untuk biaya pembelian masker, handsanitizer, disinfektan spray, biaya komunikasi, belanja barang persediaan (*medical kit*) dan belanja jasa penanganan pandemi Covid-19 (Swab Antigen/PCR Test). Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 12 bulan sepanjang tahun anggaran 2021.

e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan

Dalam rangka mengukur dan menilai pelaksanaan kegiatan baik yang terkait dengan proses maupun hasil keluaran (output) kegiatan, Pusat Penyuluhan menyelenggarakan kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi kegiatan Penyuluhan. Output monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan ini meliputi :

1. Tersusunnya Desain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2020 dan Laporan Pemantauan SPIP yang disusun setiap Triwulan.
2. Tersusunnya Laporan Tahunan Pusat Penyuluhan Tahun 2019.
3. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Tahun 2020 dan Laporan Rencana Aksi Pusat Penyuluhan Triwulan I s/d Triwulan IV.
4. Tersusunnya bahan dan data Laporan Kemajuan Kegiatan Sub Satker Pusat Penyuluhan, Laporan Kinerja Anggaran online pada aplikasi Kementerian Keuangan dengan alamat website monev.anggaran.depkeu.go.id dan Laporan Monitoring Evaluasi Triwulan pada aplikasi MONEV BAPPENAS melalui alamat website: monev.bappenas.go.id DIPA Kantor Pusat Bahan P2SDM.

Selain penyusunan Laporan, kegiatan monitoring dan evaluasi juga berkaitan dengan kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan Satker Lingkup Badan P2SDM dan monitoring dan evaluasi dampak kegiatan peningkatan penyuluhan di KTH.



Monitoring dan evaluasi dampak kegiatan peningkatan penyuluhan di KTH.

Pagu Anggaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan yaitu Rp.96.455.000,- , realisasi anggaran kegiatan yaitu Rp.96.452.256,- atau 99,99%.



f. Penyelenggaraan SPIP Pusat Penyuluhan

Kegiatan SPIP merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan seluruh pegawai Pusat Penyuluhan yang diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran lingkup Pusat Penyuluhan. Penyelenggaraan SPIP Pusat Penyuluhan meliputi:

1. Pembentukan Satgas SPIP,
2. Penyusunan Desain SPIP Tahun 2021,
3. Sosialisasi Desain SPIP kepada Seluruh Pegawai,
4. Pemantauan penyelenggaraan SPIP setiap bulan,
5. Penyusunan Laporan Pemantauan SPIP setiap Triwulan.

3. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran merupakan kegiatan pendukung kinerja organisasi Pusat Penyuluhan, yang meliputi pemeliharaan peralatan perkantoran, perawatan kendaraan bermotor roda 4 (empat), perawatan kendaraan bermotor roda 2 (dua), biaya penambah daya tahan tubuh, dan operasional perkantoran (biaya pengiriman, laminasi, kearsipan, biaya pegawai harian, langganan media massa dan lisensi *video conference*) serta belanja operasional penanganan pandemi COVID-19 (pembelian masker, handsanitizer, disinfektan spray dan biaya komunikasi), belanja barang persediaan (*medical kit*). Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 12 bulan sepanjang tahun anggaran 2021.

Pagu anggaran kegiatan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor Pusat Penyuluhan tahun 2021 yaitu sebesar

Rp. 1.640.108.000,- dengan realisasi anggaran yang tercapai yaitu Rp. 1.639.744.607,- atau sebesar 99,97%.

4. Pelayanan Umum dan Perlengkapan

a. Penyaluran Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan

Penyuluh kehutanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan kehutanan, dituntut agar lebih profesional dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai edukator, motivator, fasilitator, dinamisor, inspirator, konselor, mediator, dan advokator melalui pendampingan dan bimbingan dalam rangka pemberdayaan kepada petani/kelompok tani hutan yang menjadi binaannya. Untuk meningkatkan kinerja penyuluh kehutanan diperlukan berbagai aspek, diantaranya dukungan informasi, bimbingan dalam melakukan pendampingan yang efektif dan efisien, pembinaan mental serta pengorganisasian di dalam melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Kehutanan.

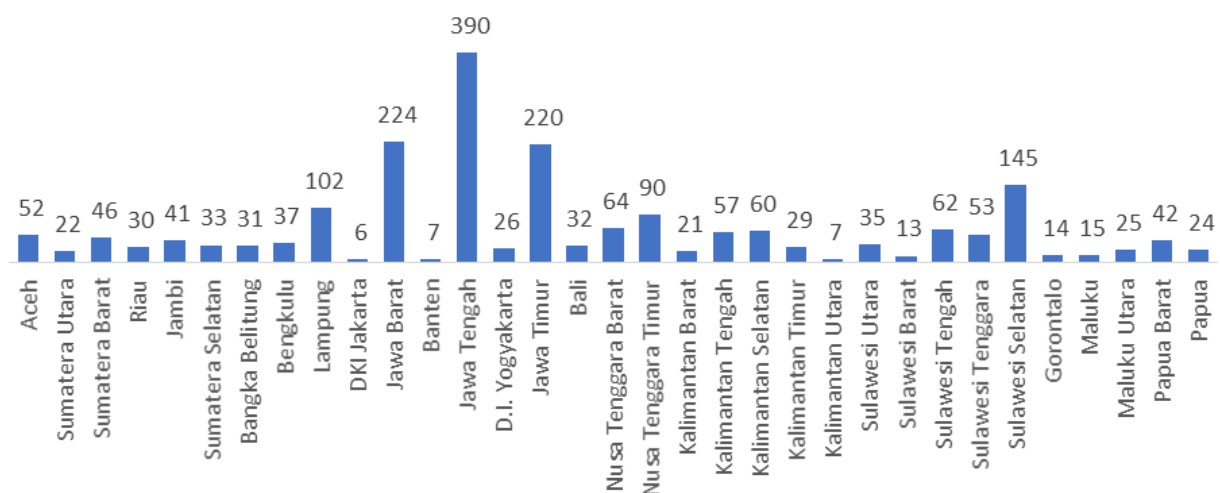
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, untuk mendukung kegiatan penyuluhan Kehutanan, pemerintah memberikan dukungan Biaya Operasional Penyuluh (BOP). Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan adalah dana yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) kepada penyuluh kehutanan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerjanya. Tujuan pemberian BOP adalah Mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan Meningkatkan kinerja penyuluh kehutanan dalam mendukung pembangunan lingkungan dan kehutanan.

Biaya Operasional Penyuluh tahun anggaran 2021 disalurkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.39/MENLHK/SETJEN/SDM.0/2/2021 kepada Penyuluh Kehutanan

Pegawai Negeri Sipil yang berada di Dinas yang menangani urusan pemerintah di bidang kehutanan atas usulan Kepala Dinas. Besaran BOP yang ditetapkan mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2019 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu :

1. Wilayah Barat yang meliputi Sumatera dan Jawa sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) orang/bulan.
2. Wilayah Tengah yang meliputi Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) orang/bulan, dan
3. Wilayah Timur yang meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) orang/bulan.

Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan tahun anggaran 2021 disalurkan kepada 2.055 Penyuluh Kehutanan PNS dari total jumlah Penyuluh Kehutanan yaitu 2.755 di 33 Provinsi. Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan sebagai penerima BOP harus memenuhi kriteria telah diangkat secara definitif sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan tentang pengangkatan pertama sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan. Adapun sebaran Penyuluh Kehutanan PNS penerima BOP tahun 2021 di 33 provinsi tersaji sebagaimana Gambar 3.2.



Gambar 3.3. Sebaran Penyuluh Kehutanan PNS penerima BOP tahun 2021 di 33 provinsi.

Penyaluran BOP Penyuluh Kehutanan PNS dilakukan setiap bulan berdasarkan penyampaian laporan bulanan kegiatan Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan. Biaya operasional sebagaimana dimaksud digunakan oleh Penyuluh Kehutanan dalam melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan dan pendampingan Kelompok Tani Hutan. Berdasarkan data statistik Pusat Penyuluhan yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH) yang dikembangkan oleh Pusat Penyuluhan BP2SDM, jumlah Kelompok Tani Hutan di 33 Provinsi kecuali Provinsi Kepulauan Riau yang belum memiliki Penyuluh Kehutanan, tersaji sebagaimana Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Sebaran Penyuluh Kehutanan penerima BOP dan sebaran Kelompok Tani Hutan di 33 provinsi.

No	Provinsi	Jumlah PK penerima BOP	Jumlah Kelompok Tani Hutan
1	Aceh	52	401
2	Sumatera Utara	22	243
3	Sumatera Barat	46	319
4	Riau	30	39
5	Jambi	41	334
6	Sumatera Selatan	33	152
7	Bangka Belitung	31	9
8	Bengkulu	37	284
9	Lampung	102	220
10	DKI Jakarta	6	5
11	Jawa Barat	224	4.160
12	Banten	7	654
13	Jawa Tengah	390	7.106
14	D.I. Yogyakarta	26	1.154
15	Jawa Timur	220	3.161
16	Bali	32	255
17	Nusa Tenggara Barat	64	219
18	Nusa Tenggara Timur	90	28
19	Kalimantan Barat	21	135
20	Kalimantan Tengah	57	204
21	Kalimantan Selatan	60	268
22	Kalimantan Timur	29	44
23	Kalimantan Utara	7	22
24	Sulawesi Utara	35	120
25	Sulawesi Barat	13	442
26	Sulawesi Tengah	62	362
27	Sulawesi Tenggara	53	340
28	Sulawesi Selatan	145	1.733
29	Gorontalo	14	75
30	Maluku	15	7
31	Maluku Utara	25	83
32	Papua Barat	42	7
33	Papua	24	11

Pagu anggaran Biaya Operasional Penyuluh tahun 2021 sebesar Rp. 9.175.490.000,- atau 53,94% dari jumlah pagu anggaran Pusat Penyuluhan. Realisasi sampai dengan akhir bulan Desember 2021 sebesar Rp. 9.174.247.028,- (99,98%).

Pada tahun berjalan, guna optimalisasi pemanfaatan BOP, Pusat Penyuluhan menyelenggarakan berbagai kegiatan Bimbingan Teknis baik dalam pelaksanaan

penyuluhan maupun penyusunan laporan BOP melalui SIMLUH. Laporan Penyuluh Kehutanan penerima BOP juga melibatkan atau diketahui oleh atasan langsung sebagai pejabat approval, agar kegiatan Penyuluh Kehutanan juga dapat diketahui oleh atasan langsungnya.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Biaya Operasional Penyuluh, beberapa hal yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan jumlah Penyuluh Kehutanan dengan jumlah Kelompok Tani yang menjadi sasaran kinerja Penyuluh Kehutanan di sebagian besar provinsi jumlah Penyuluh Kehutanan sangat kurang, sehingga perlu adanya himbuan atau masukan kepada pemerintah daerah untuk mengkaji ulang formasi pengadaan Penyuluhan Kehutanan atau mengoptimalkan sumber daya tenaga Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dalam melakukan pendampingan Kelompok tani.
2. Besaran Biaya Operasional Penyuluhan yang telah ditetapkan merupakan besaran biaya yang ditetapkan sejak tahun 2013, dan jika dikaji terhadap perkembangan kebutuhan operasional kegiatan penyuluhan, besaran BOP saat ini dapat dikatakan sudah tidak relevan terutama dalam pelayanan penyuluhan di daerah pelosok, karena hampir sebagian besar Kelompok Tani Hutan kedudukannya berada di pingir dan sekitar hutan.
3. Laporan Penyuluh Kehutanan penerima BOP selama ini disampaikan melalui SIMLUH yang memberikan manfaat bagi Pusat Penyuluhan dalam menarik data dan informasi tentang berbagai kegiatan penyuluhan kegiatan dan pendampingan. Menyikapi potensi tersebut perlu pengembangan sistem yang nantinya dapat menghasilkan data dan informasi yang dapat diolah dan disajikan terutama terkait output dan outcome terhadap kegiatan penyaluran BOP.

5. Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluhan

Pendampingan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di tingkat lapangan untuk dapat hadir ditengah masyarakat, terutama keberadaan Penyuluh Kehutanan yang hadir dan mendampingi Kelompok Tani Hutan yang merupakan sasaran penyuluhan kehutanan. Statistik Pusat Penyuluhan Tahun 2020 mencatat bahwa jumlah Penyuluh Kehutanan di seluruh Indonesia sebanyak 8.954 orang, terdiri atas 2.755 orang Penyuluh Kehutanan PNS, 5.542 orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan 657 orang Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS).

Guna menyiapkan Penyuluh Kehutanan sebagai pendamping yang kompeten, diperlukan peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan melalui berbagai kegiatan seperti temu teknis dan berbagai kegiatan pembinaan teknis. Berkaitan dengan kompetensi pendampingan usaha KTH, Penyuluh Kehutanan perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kewirausahaan/ entrepreneurship. Menyikapi masa pandemi covid-19 dan mematuhi anjuran Pemerintah social dan physical distancing, maka kegiatan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan tentang kewirausahaan berbasis komoditas dilaksanakan melalui media dalam jaringan (daring) atau online yang terintegrasi dengan Learning Management System (LMS) yang saat ini dikelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM dan mengelaborasi berbagai potensi baik materi, narasumber, serta fasilitator Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS.

Peningkatan kapasitas Penyuluh dan/ atau pendamping handal merupakan target Indikator Kinerja (IKK) 1 dengan target pada tahun 2021 sebanyak 1.030 orang. Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun yaitu 1.288 orang atau sebesar 125,05%. Capaian kinerja yang melebihi target disebabkan karena pelaksanaan kegiatan dilakukan secara online

sehingga kegiatan peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan dapat diikuti lebih banyak peserta.

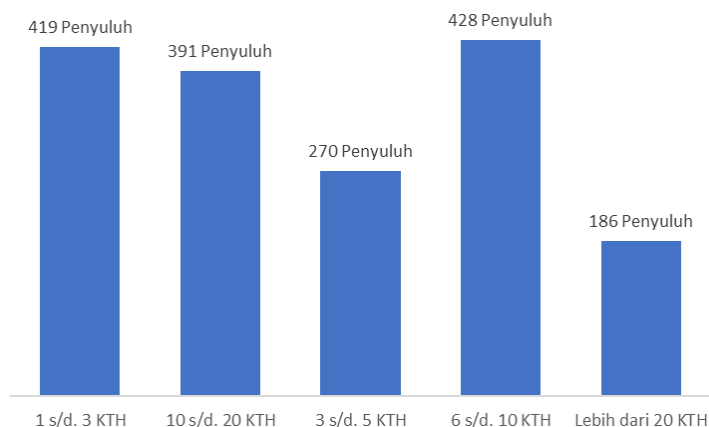
Temu Teknis Penyuluh Kehutanan dalam rangka peningkatan kapasitas Penyuluh/ Pendamping handal diselenggarakan dengan tahapan dan penentuan peserta serta substansi materi sebagai berikut :

a. Identifikasi potensi dan kebutuhan peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan

Identifikasi ini untuk memetakan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan Penyuluh Kehutanan dalam pelaksanaan pendampingan dengan basis komoditas yang dikembangkan oleh KTH. Selain itu juga untuk menentukan jenis materi serta kedalaman materi yang akan disampaikan dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan tahun 2021 dan memetakan permasalahan pendampingan yang terkait dengan pengetahuan dan kompetensi Penyuluh Kehutanan.

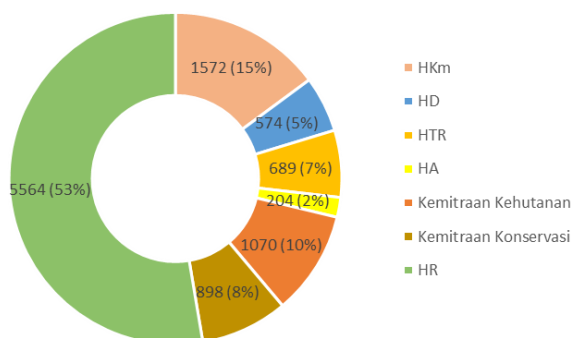
Identifikasi dilakukan melalui survey online dengan dengan tautan berikut <https://bit.ly/KuesionerPeningkatanKapasitasPK2021>. Survey telah mendapat respon sebanyak 1.694 Penyuluh Kehutanan atau 61,22% dari jumlah 2.755 orang Penyuluh Kehutanan se-Indonesia. Salah satu hasil survei menunjukkan bahwa 86% Kelompok Tani Hutan (KTH) yang didampingi, masih berada dalam kelas Pemula dan 12% yang berada pada kelas Madya serta hanya 2 % pada kelompok Utama. Komoditas unggulan yang diusahakan oleh KTH adalah agroforestry, madu, wisata alam, kopi dan aren.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan bahwa jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang didampingi oleh Penyuluh Kehutanan sangat beragam mulai dari 1 (satu) KTH hingga 20 (dua puluh) KTH bahkan terdapat beberapa Penyuluh Kehutanan memiliki KTH dampingan lebih dari 20 (dua puluh) KTH, sebagaimana data berikut :



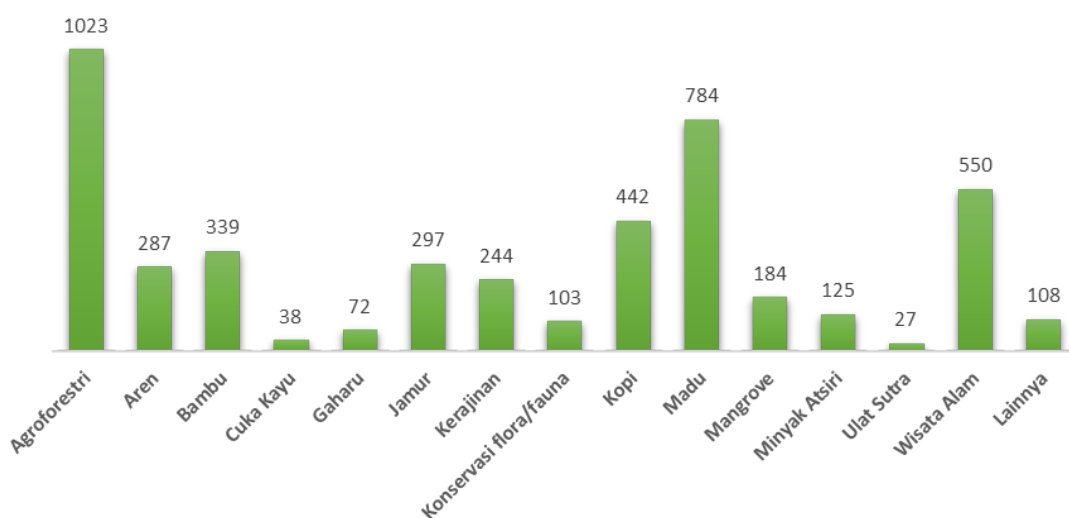
Gambar 3.4. Grafik Data Jumlah KTH yang didampingi oleh setiap Penyuluh Kehutanan.

Kelompok yang didampingi oleh Penyuluh Kehutanan yang mengikuti survey ini, berdasarkan skema pengelolannya atau usahanya sangat beragam seperti Hutan Kemasayarakatan (HKm), Hutan tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Kemitraan Kehutanan, Hutan Adat (HA), Kemitraan Konservasi (KemKom), dan Hutan Rakyat (HR) sebagaimana data berikut :



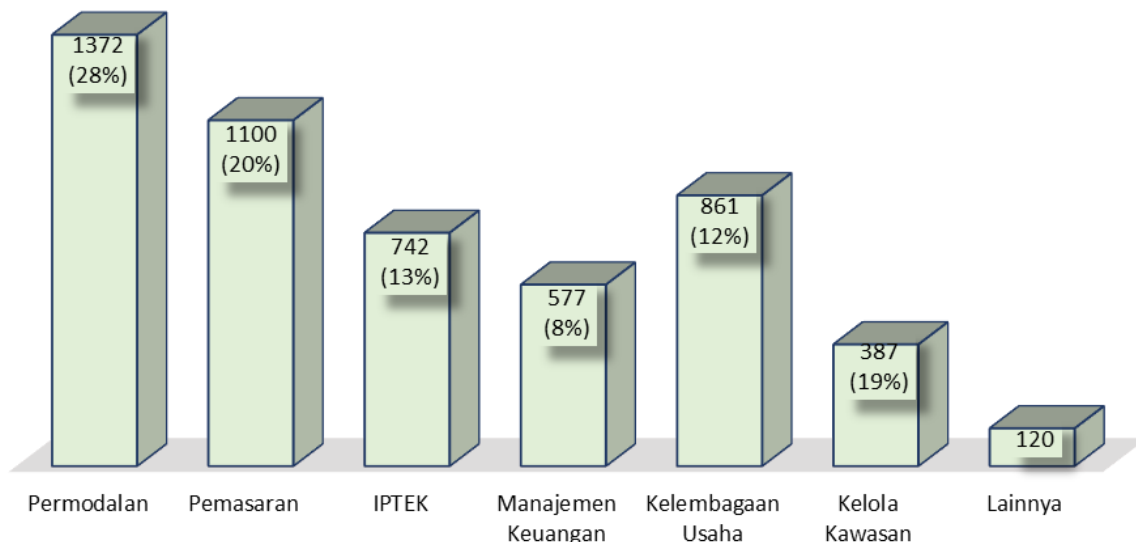
Gambar 3.5. Grafik Hasil Survey Kelompok Berdasarkan Skema Pengelolaan Hutan.

Komoditas yang diusahakan dan dikembangkan oleh Kelompok Tani Hutan sebagaimana dimaksud juga sangat beragam, mulai dari agroforestry, aren, bambu, cuka kayu, gaharu, jamur, kerajinan, konservasi flora/fauna, kopi, madu, mangrove, minyak atsiri, ulat sutra, wisata alam, dan produk lainnya sebagaimana data berikut.



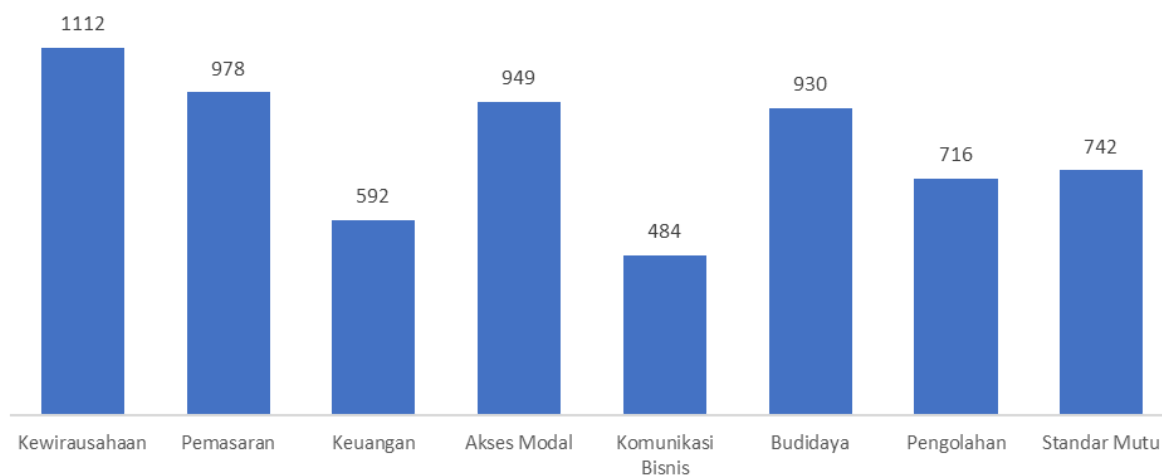
Gambar 3.6. Grafik Komoditas yang diusahakan dan dikembangkan oleh Kelompok Tani Hutan.

Penyuluh Kehutanan melakukan pendampingan terhadap 3 (tiga) kelola yaitu, kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. Proses pendampingan tentunya tidak selalu berjalan lancar, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Tani Hutan sangat beragam. Berdasarkan hasil survey diperoleh data sebagai berikut :



Gambar 3.7. Grafik Hasil Survey Permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Tani Hutan.

Menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Tani Hutan, dalam survey dimaksud juga menjangkir kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan oleh Penyuluh Kehutanan agar dapat menjawab berbagai solusi yang dibutuhkan dalam pendampingan. Data survey menunjukan bahwa kebutuhan pelatihan atau pengetahuan yang diinginkan oleh Penyuluh Kehutanan yang menjadi responden adalah sebagai berikut :



Gambar 3.8. Grafik Hasil Survey Kebutuhan Pelatihan yang diinginkan oleh Penyuluh Kehutanan.

Pagu anggaran kegiatan Identifikasi potensi dan kebutuhan peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan tahun 2021 sebesar Rp. 3.656.000,- dan telah terealisasi sebesar 100%.

b. Penyusunan dan Penggandaan Modul Pembelajaran

Kegiatan penyusunan dan penggandaan modul pembelajaran dilakukan dengan tujuan menyediakan pedoman pembelajaran pada kegiatan peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan melalui kegiatan temu teknis. Modul pembelajaran dibuat dalam bentuk video agar mudah dipahami oleh peserta temu teknis dan mengingat keterbatasan narasumber dalam menarasikan pengalaman serta pengetahuannya terkait materi yang akan disampaikan pada kegiatan temu teknis tersebut. Modul pembelajaran yang disusun pada tahun 2021 ini meliputi :

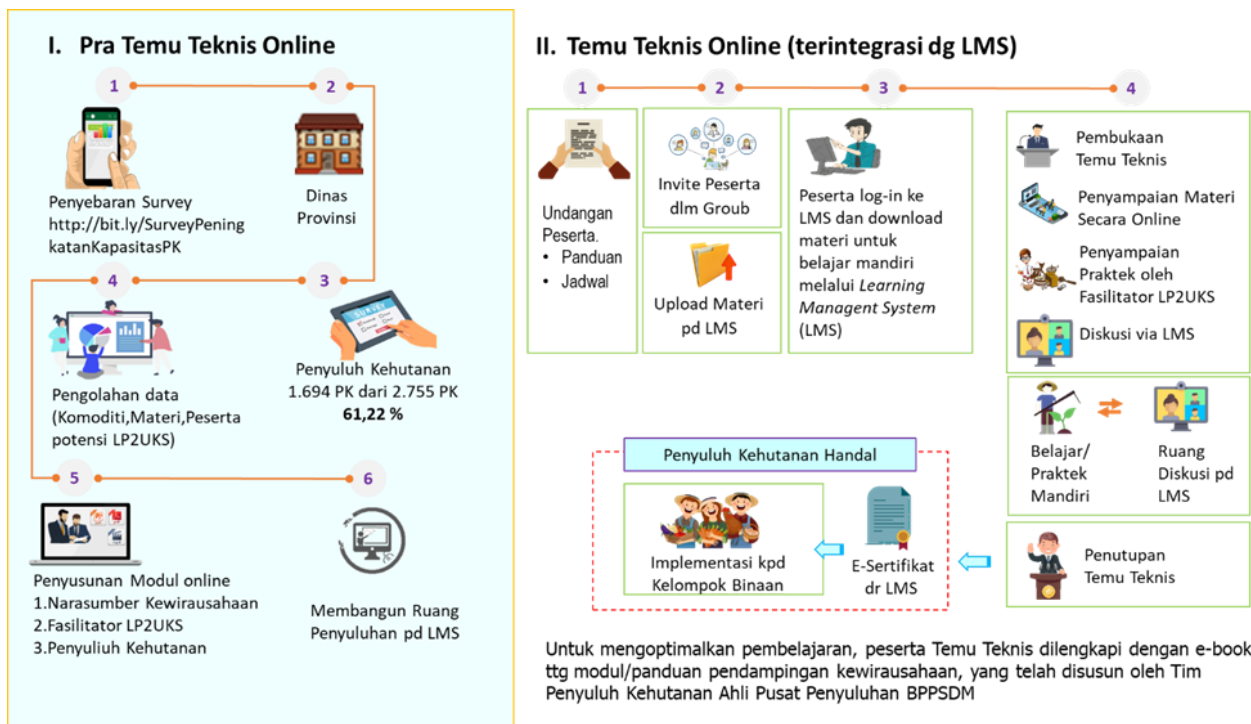
1. Modul Pembelajaran Temu Teknis Kewirausahaan komoditas Aren,
2. Modul Pembelajaran Temu Teknis Kewirausahaan komoditas Porang.

Pagu anggaran kegiatan Penyusunan dan Penggandaan Modul Pembelajaran tahun 2021 sebesar Rp. 30.230.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 30.229.200,- atau 100%.

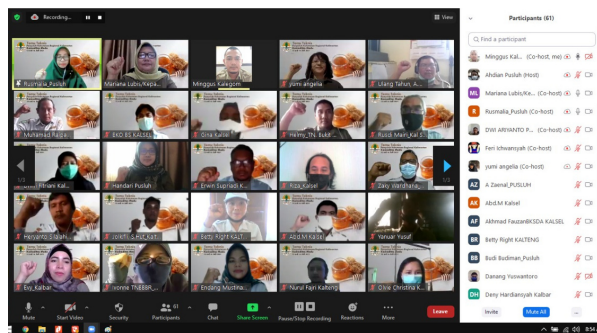
c. Temu Teknis Penyuluh Kehutanan PNS dan Non Aparatur Berbasis Komoditas

Temu Teknis PK PNS Berbasis Komoditas

Hasil identifikasi potensi dan kebutuhan peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan menjadi data awal dalam Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan agar metode maupun substansi materi dalam Temu Teknis tersebut dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan di tingkat pendampingan di lapangan. Temu Teknis Penyuluh Kehutanan diselenggarakan secara virtual yang terintegrasi dengan *Learning Management System* (LMS) dilaksanakan di 5 (lima) regional yaitu regional Sumatera, regional Jawa, regional Kalimantan, regional Sulawesi, regional Bali-Nusa Tenggara - Maluku - Papua. Metode pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi dengan *Learning Management System* (LMS) atau e-learning dapat digambarkan melalui skema berikut :



Gambar 3.9. Metode pelaksanaan kegiatan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan berbasis komoditas.



Temu Teknis Penyuluh Kehutanan di setiap regional disesuaikan kebutuhan materi yang diperoleh dari hasil identifikasi melalui survey sebelumnya. Rata-rata peserta pada setiap Temu Teknis Penyuluh Kehutanan adalah 50 (lima puluh) peserta yang dijamin dari Penyuluh Kehutanan yang mengikuti survey. Kegiatan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan waktu penyelenggaraan, jumlah peserta dan materi di setiap regional wilayah dapat kami sajikan melalui infografis berikut.



Gambar 3.10. Infografis waktu pelaksanaan, jumlah peserta dan materi di setiap regional wilayah kegiatan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan.

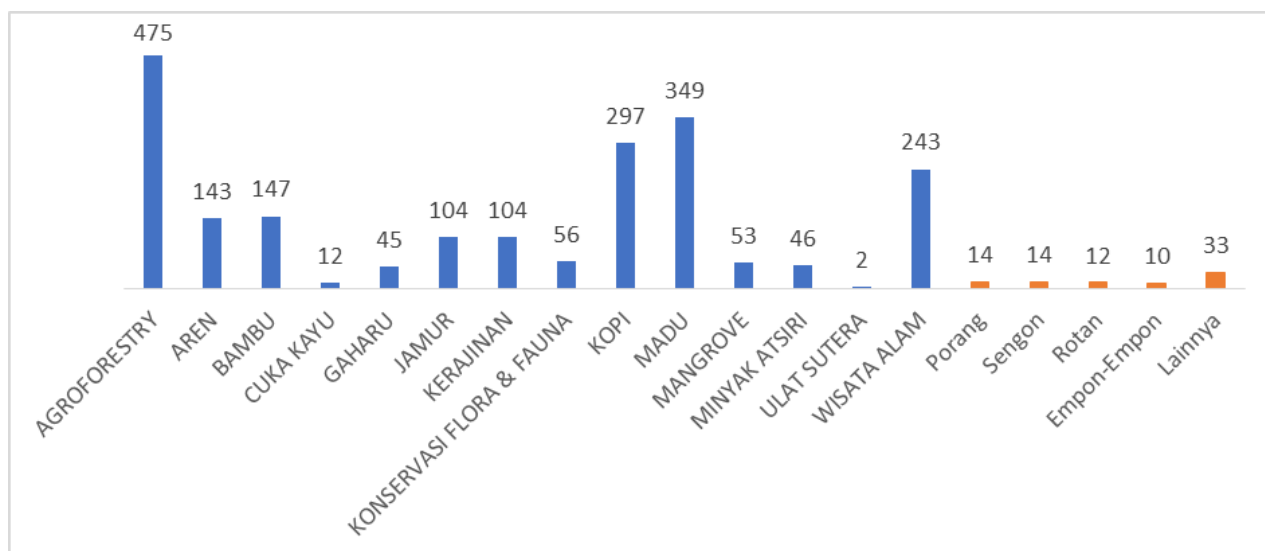
Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan melalui pengisian kuisioner oleh peserta, kesesuaian materi Temu Teknis Berbasis Komoditas dengan kebutuhan peserta rata-rata 50% menyatakan sangat baik, 42% menyatakan baik dan 8% cukup. Data ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Penyuluh Kehutanan di lapangan.

Permasalahan dari kegiatan peningkatan kapasitas secara daring melalui Learning Management System (LMS) yaitu beberapa peserta mengalami kendala sinyal jaringan di tempat kerja atau tempat tinggal sehingga peserta banyak kesulitan untuk

sehingga peserta banyak kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Tingkat pengetahuan terkait penggunaan website e-learning di website KLHK juga menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi penyelenggara yang menyebabkan penyelenggara kegiatan harus terus menerus melakukan sosialisasi pemanfaatan e-learning kepada peserta. Terkait permasalahan ini, Pusat Penyuluhan membangun koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kehutanan/ Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan KPH yang merupakan instansi pembina Penyuluh Kehutanan di daerah agar Penyuluh dapat mengikuti kegiatan Temu Teknis dengan lancar.

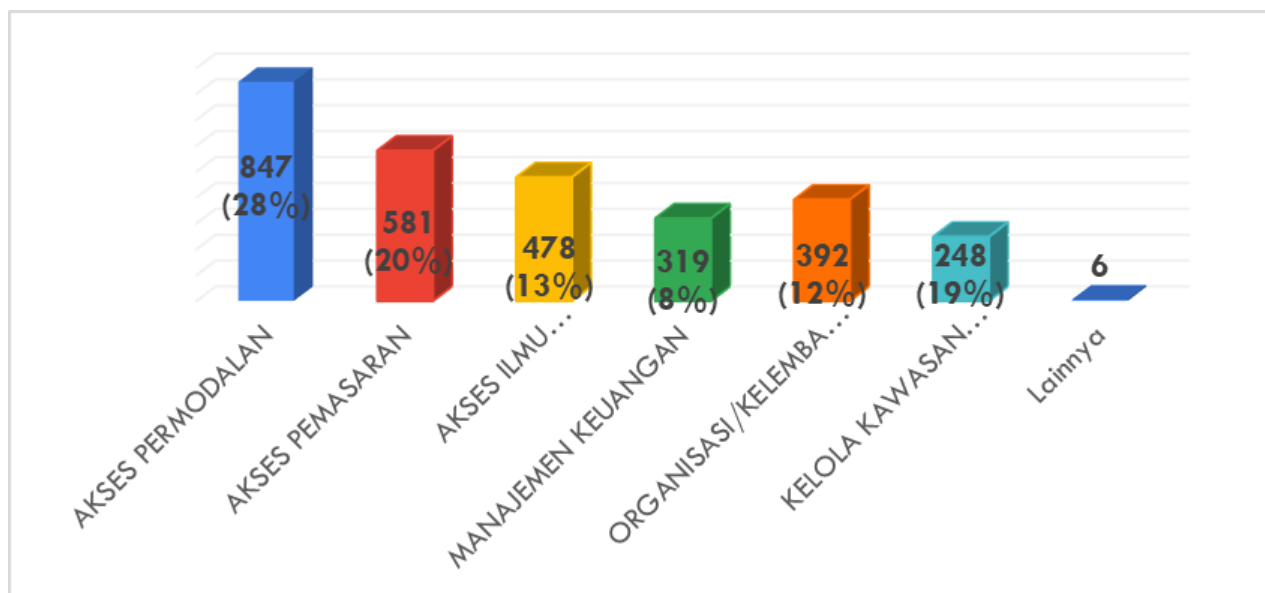
Temu Teknis PKSM Berbasis Komoditas

Pelaksanaan temu teknis PKSM diawali dengan melakukan survey kebutuhan peningkatan kapasitas PKSM tahun 2021 guna keperluan menjaring peserta, mengetahui potensi yang dikembangkan, mengetahui permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan yang diperlukan oleh PKSM. Survey telah dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei 2021 melalui alamat (link) <https://bit.ly/KuesionerPeningkatanKapasitasPKSM2021> dengan hasil survey sebagai berikut.



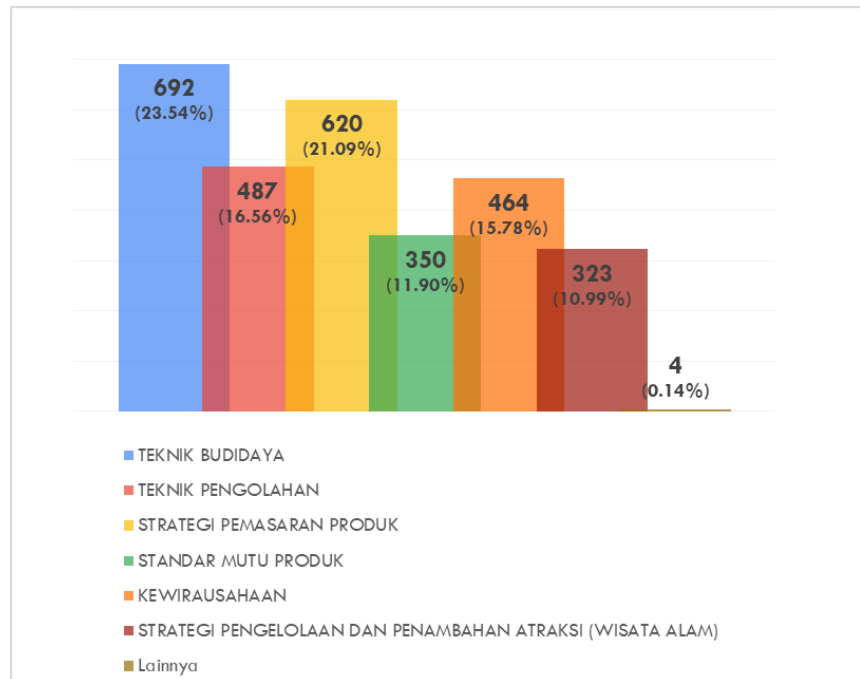
Gambar 3.11. Grafik Komoditas yang diusahakan oleh KTH/PKSM.

Permasalahan yang dihadapi oleh KTH/PKSM meliputi akses modal, pemasaran, akses ilmu pengetahuan dan kelola usaha/kelembagaan sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.12 Grafik Permasalahan yang dihadapi oleh KTH/PKSM.

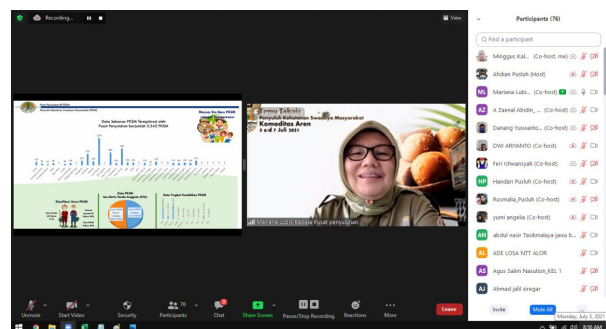
Menyikapi permasalahan yang dihadapi PKSM, dalam survey tersebut juga menjangkit kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan oleh PKSM agar dapat menjawab berbagai solusi yang dibutuhkan dalam pendampingan. Data survey menunjukkan bahwa kebutuhan pelatihan atau pengetahuan yang diinginkan oleh PKSM yang menjadi responden adalah sebagai berikut.



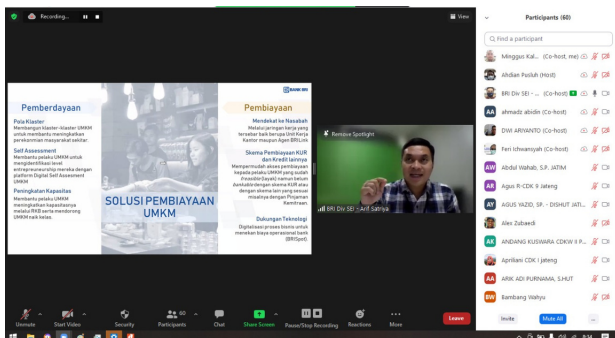
Gambar 3.13. Grafik Hasil Survey Kebutuhan Pelatihan yang diinginkan oleh PKSM.

Temu Teknis PKSM pada tahun 2021 dilaksanakan 2 kali dengan komoditas Aren dan Bambu dengan peserta masing-masing 60 orang secara online yang terintegrasi dengan LMS Pusdiklat KLHK.

Temu Teknis PKSM Komoditas Aren dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 5 s/d 7 Juli 2021 dengan peserta 60 orang yang berasal dari 20 Provinsi, yaitu Aceh, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah,



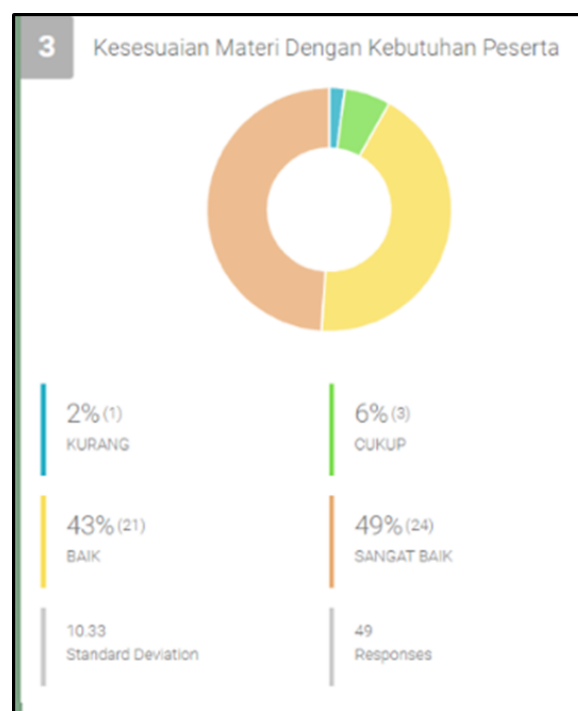
Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Materi yang disampaikan antara lain : Teknik Budidaya Aren, Pengolahan Nila Aren, Pemasaran dan akses pemodalannya baik perbankan maupun investasi. Hasil evaluasi peserta terhadap kesesuaian materi Temu teknis dengan kebutuhan peserta diperoleh penilaian kurang 4 %, cukup 13%, baik 44 % dan sangat baik 38 % (Gambar). dengan kata lain penilaian baik dan sangat baik sebesar 82 %. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta temu teknis.



Temu Teknis PKSM Komoditas Bambu dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 31 Agustus s/d 2 September 2021 dengan peserta sebanyak 60 orang yang berasal dari 19 (sembilan belas) Provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Materi yang disampaikan anatar lain : Teknik Budidaya Bambu, Pengolahan bambu, Pemasaran dan akses pemodaln baik perbankan maupun investasi. Hasil evaluasi peserta terhadap kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta diperoleh penilaian kurang 2 %, cukup 6%, baik 43 % dan sangat baik 49 % (Gambar ...). Dengan kata lain penilaian baik dan sangat baik sebesar 92 %. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan

sesuai dengan kebutuhan peserta temu teknis ini.



Gambar 3.14. Grafik Kesesuaian Materi dengan Kebutuhan Peserta (PKSM).

Pelaksanaan temu teknis bekerja sama dengan Pusat Diklat SDM LHK dalam pemanfaatan *Learning Management System* (LMS) sebagai media pembelajaran daring. Selain itu, kegiatan temu teknis juga mengelaborasi berbagai potensi dari berbagai pihak, baik dalam pentusunan materi, pemilihan narasumber praktisi dan akademisi serta pemilihan fasilitator dari Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS.

Alokasi anggaran temu teknis online berbasis komoditas Penyuluh Kehutanan Aparatur dan Non Aparatur tahun 2021 adalah sebesar Rp. 546.649.000,- telah terealisasi sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp. 545.846.300,- atau 99,85%.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan indikator kinerja penyuluh dan/atau pendamping handal melalui kegiatan temu teknis, peserta temu teknis menunjukkan *feedback* positif. Penyuluh Kehutanan/Pendamping KTH memiliki persepsi dan pengetahuan baru dalam mengembangkan usaha KTH dari proses budidaya hingga pemasaran serta mengenali pasar dan aplikasi bisnis. Hal tersebut sangat berguna bagi penyuluh untuk ditularkan kepada kelompok binaan di wilayah kerjanya.

Dampak lain dalam kegiatan temu teknis yaitu terbentuknya jejaring usaha antar sesama peserta dan juga narasumber (sebagian narasumber berasal dari dunia usaha dan lembaga pemodaln) terkait akses modal, teknologi dan pasar. Masalah yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan temu teknis adalah jaringan/sinyal bagi peserta yang berada di daerah pelosok. Terkait hal tersebut, Pusat Penyuluhan telah mengupayakan biaya transport bagi peserta yang tinggal di daerah yang kurang dapat dijangkau oleh sinyal operator ke daerah yang lebih kondusif seperti di kantor kecamatan atau kabupaten. Selain itu, Pusat Penyuluhan berkoordinasi dengan Sekretariat Badan P2SDM telah mengajukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengembangkan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi di wilayah binaan penyuluh kehutanan.

d. Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluh Kehutanan Non Aparatur

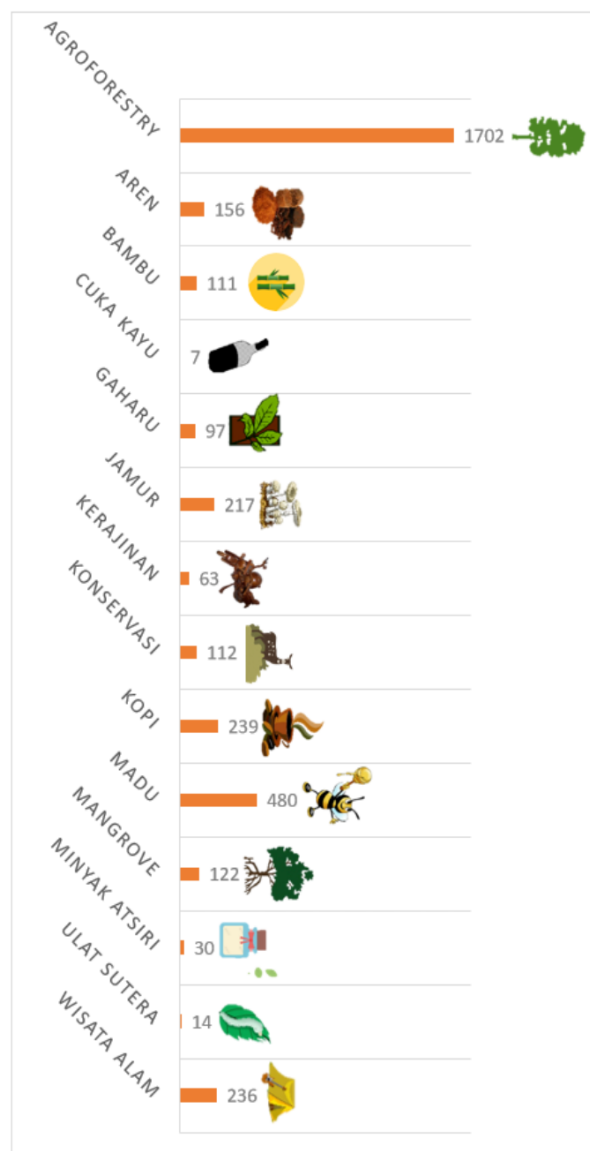
Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)

Kegiatan identifikasi dan pemetaan ketenagaan penyuluh kehutanan non aparatur diharapkan mampu mengidentifikasi dan memetakan penyuluh kehutanan baik Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) maupun Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) dalam hal jumlah tenaga, sebaran, aktivitas dan kegiatan serta kemampuan dan keterampilan masing-masing penyuluh.

Jumlah PKSM yang terintegrasi oleh sekretariat pendataan PKSM sampai dengan akhir Desember 2021 adalah sebanyak 6.125 orang. Selama tahun 2021 terdapat penambahan data PKSM terintegrasi sebanyak 583 orang. Dari jumlah tersebut 2.804 orang telah diterbitkan kartu tanda anggota PKSM. Secara umum jenjang pendidikan PKSM bervariasi dari sekolah dasar sampai dengan S2, namun mayoritas PKSM berpendidikan SLTA yaitu 2.597 orang, sedangkan yang berpendidikan D1-D3 sebanyak 120 orang, S1 sebanyak 810 orang dan S2 sebanyak 28 orang. Namun demikian yang tidak mengisi jenjang pendidikan masih tinggi yakni mencapai 1.482 orang.

Hasil identifikasi dan pemetaan terhadap data PKSM yang melakukan pendampingan kegiatan perhutanan sosial menunjukkan bahwa terdapat 527 orang yang melakukan kegiatan pendampingan kegiatan perhutanan sosial yang tersebar di 24 provinsi. Data Pusluh saat ini mencatat 3.582 PKSM yang terdata usaha komoditasnya. Sebagian besar (47,46%) bergerak di bidang Hutan Rakyat/Agroforestry, 13,39% Budidaya Lebah Madu, 6,66% Budidaya Kopi, 6,58% Pengelolaan Wisata Alam, 6,05% Budidaya

Jamur Tiram, 4,35 % Budidaya Aren, dan sisanya di bawah 4% yaitu Budidaya Bambu, Budidaya Gaharu, Pengolahan Cuka Kayu/Asap Cair, Pembuatan Kerajinan/Souvenir, Teknik Konservasi Flora/Fauna, Pengolahan Minyak Atsiri (Nilam, Kayu Putih), dan Budidaya Ulat Sutra.



Gambar 3.15. Komoditas unggulan PKSM.

Pagu anggaran identifikasi dan pemetaan ketenagaan penyuluh kehutanan non aparatur Rp. 90.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 90.092.400,- atau sebesar 99,99%.

Hasil identifikasi terhadap PKSM menunjukkan bahwa terdapat 6.125 orang penyuluh yang tersebar pada 32 provinsi di Indonesia, sebaran PKSM berdasarkan provinsi dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6. Sebaran PKSM Berdasarkan Provinsi.

No	Provinsi	Jumlah
1	Aceh	156
2	Sumatera Utara	157
3	Sumatera Barat	144
4	Riau	98
5	Jambi	108
6	Sumatera Selatan	116
7	Bangka Belitung	15
8	Bengkulu	209
9	Lampung	551
10	Banten	195
11	Jawa Barat	1382
12	DKI Jakarta	2
13	Jawa Tengah	708
14	D.I.Yogyakarta	108
15	Jawa Timur	797
16	Bali	136
17	NTB	133
18	NTT	11
19	Kalimantan Barat	115
20	Kalimantan Tengah	42
21	Kalimantan Selatan	176
22	Kalimantan Timur	29
23	Kalimantan Utara	10
24	Sulawesi Utara	124
25	Sulawesi Barat	107
26	Sulawesi Tengah	128
27	Sulawesi Tenggara	106
28	Sulawesi Selatan	241
29	Gorontalo	7
30	Maluku	3
31	Maluku Utara	6
32	Papua	5
	JUMLAH	6.125

Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS)

Hasil identifikasi terhadap PKS menunjukkan bahwa jumlah PKS yang terdata oleh Pusat Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2021 adalah sebanyak 1.009 orang yang tersebar di 23 provinsi dan 143 perusahaan/divisi regional/korporasi. Bila dibandingkan dengan data PKS pada akhir Desember 2020, maka terdapat penambahan 23 orang dengan rata-rata persentase penambahan PKS yang terintegrasi pada tahun 2021 adalah 2,33%. Data sebaran PKS secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7. Sebaran PKS Berdasarkan Provinsi.

No	Provinsi	L	P	Jumlah
1	Aceh	1		1
2	Bali	1		1
3	Bangka Belitung	5		5
4	Banten	4		4
5	Bengkulu	4		4
6	D.I.Yogyakarta	5		5
7	DKI Jakarta	7		7
8	Gorontalo	1		1
9	Jambi	62	1	63
10	Jawa Barat	38		38
11	Jawa Tengah	197	11	208
12	Jawa Timur	283	4	287
13	Kalimantan Barat	63	4	67
14	Kalimantan Selatan	61	3	64
15	Kalimantan Tengah	2		2
16	Kalimantan Timur	5	3	8
17	Lampung	2	1	3
18	Maluku	31		31
19	Papua	12	2	14
20	Riau	60	1	61
21	Sulawesi Tengah	3		3
22	Sumatera Selatan	90	2	92
23	Sumatera Utara	39	1	40
	JUMLAH	976	33	1.009



Asistensi Pendampingan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
di KTH Lima Bersaudara, Palangkaraya.

6. Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluhan (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. PEN merupakan respon pemerintah selain penanganan krisis kesehatan, atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19.

Salah satu kegiatan kehutanan yang potensial untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat adalah pengembangan agroforestry. Agroforestry merupakan pola penggunaan lahan yang berbasis pemanfaatan ruang tumbuh. Penerapan agroforestry pada berbagai sistem atau program pengelolaan hutan sangat potensial meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung upaya pelestarian sumber daya hutan serta peningkatan ketahanan pangan. Agroforestri ini dapat menjadi salah satu solusi dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

PEN difokuskan pada kelompok-kelompok Perhutanan Sosial yang memiliki izin di areal Kawasan Hutan Negara. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan guna mendukung program PEN ini. Kegiatan pendampingan dalam program PEN ini perlu dilakukan guna lancarnya semua kegiatan selama program ini berjalan. Kegiatan pendampingan yang terukur akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelompok untuk menghasilkan produk pangan dari hutan dengan kualitas dan kuantitas yang optimal. Keberadaan tenaga pendamping menjadi salah satu kunci dalam mendorong produktifitas kelompok, dengan memberikan pendampingan dalam mengelola kelembagaan, mengelola kawasan serta mengelola usaha.

Kegiatan PEN Tahun 2021 ditetapkan di Provinsi Kalimantan Tengah dan difokuskan di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini dilaksanakan di 10 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan 20 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan jumlah pendamping sebanyak 30 orang Pendamping. Pendamping berasal dari Penyuluh Kehutanan, PEH dan Staf pada Dinas/KPH yang sudah melalui pengusulan dinas dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan. Adapun data Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan KUPS disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8. Daftar Kelompok Perhutanan Sosial & Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Sasaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021.

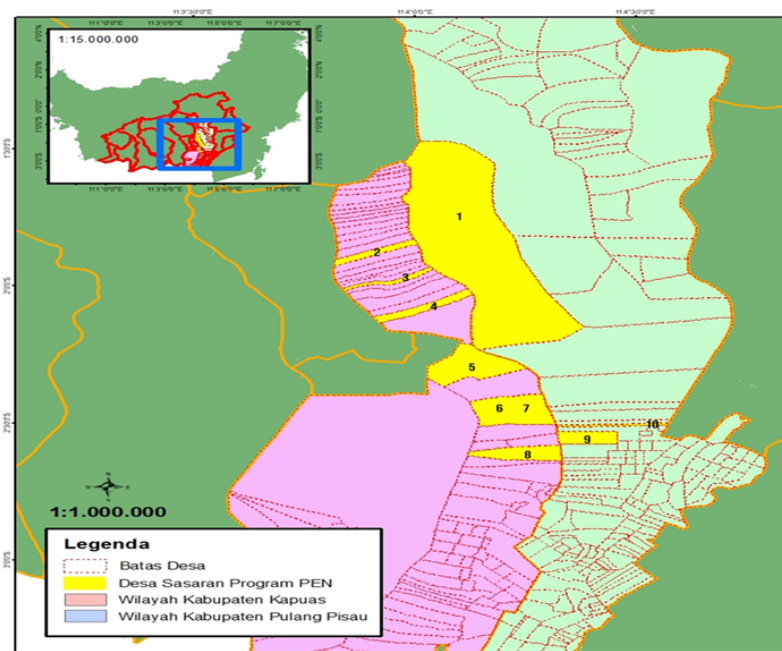
No	Nama Izin / Kelompok Perhutanan Sosial (KPS)	Nama Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kabupaten	Kecamatan	Desa
1	KTH Ije Atei	1 KUPS Agroforestry "Kahanjak Atei"	Kapuas	Mantangai	Pulau Kaladan
		2 KUPS Budidaya Karet "Batang Pabelum"			
2	KTH Rimba Lestari	1 KUPS Agroforestry Lunuk Ramba	Kapuas	Mantangai	Mantangai Tengah
		2 KUPS Silvofishery Handep Hapakat			
3	LPHD Pelita Muda / (LPHD Tumbang Mangkutup)	1 KUPS Agroforestry "Itah Tempon Gawi"	Kapuas	Mantangai	Tumbang Mangkutup
		2 KUPS Perikanan "Maju Makmur"			
4	LPHD Parahangan	1 KUPS HHBK	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Parahangan
		2 KUPS Silvopastura			
5	LPHD Bukit Liti	1 KUPS Perlebahan	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Bukit Liti
		2 KUPS Silvofishery			
6	LPHD Pilang	1 KUPS Perikanan "Karya Bersama"	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Pilang
		2 KUPS Budidaya Kelulut "Eka Bahuroi"			
7	MHA Barasak Desa Pilang	1 KUPS Agroforestry & Lebah Madu Kalulut Pambulan	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Pilang
		2 KUPS Silvofishery Barasak			
8	LPHD Penda Barania	1 KUPS Agrosilvofishery	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Penda Barania
		2 KUPS Silvopastura			
9	LPHD Henda	1 KUPS Agroforestry Kahanjak Henda	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Henda
		2 KUPS HHBK Henda Sejahtera			
10	LPHD Tanjung Taruna	1 KUPS Taruna Mandiri	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Tanjung Taruna
		2 KUPS Taruna Bersatu			

Tabel 3.9. Data Pendamping Kelompok Perhutanan Sosial & Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Sasaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021.

No	Nama	Instansi	Pendamping
1	Osaka, S.Hut	KPHL Kapuas Kahayan	Koordinator Pendamping KPS KTH Ije Atei
2	Siti Norafiah	KPHL Kapuas Kahayan	Pendamping KUPS Agroforestry "Kahanjak Atei"
3	Miliani	KPHL Kapuas Kahayan	Pendamping KUPS Budidaya Karet "Batang Pabelum"
4	Nani, S.Hut	KPHL Kapuas Kahayan	Koordinator Pendamping KPS LPHD Tanjung Taruna
5	Singah, S.Hut	KPHL Kapuas Kahayan	Pendamping KUPS Taruna Mandiri
6	Ario Marseila	KPHL Kapuas Kahayan	Pendamping KUPS Taruna Bersatu
7	Ir. Maulidarni M, S.Hut, IPP	KPHL Kapuas Kahayan	Koordinator Pendamping KPS KTH Rimba Lestari
8	Nur Milasari, S.Hut	KPHL Kapuas Kahayan	Pendamping KUPS Agroforestry Lunuk Ramba
9	Angsit Wahyudi, S.P	KPHL Kapuas Kahayan	Pendamping KUPS Silvofishery Handep Hapakat
10	Faturrahman, S.Hut	KPHL Kapuas Kahayan	Koordinator Pendamping KPS LPHD Pelita Muda / (LPHD Tumbang Mangkutup)
11	Muhammad Decky	KPHL Kapuas Kahayan	Pendamping KUPS Agroforestry "Itah Tempon Gawi"
12	Rimna Margaretha B., A.Md	KPHL Kapuas Kahayan	Pendamping KUPS Perikanan "Maju Makmur"
13	Muhammad Adek Soegiarto, S.Kom	KPHP Kahayan Tengah	Koordinator Pendamping KPS LPHD Parahangan
14	Muhammad Arifin Setiawan	KPHP Kahayan Tengah	Pendamping KUPS HHBK
15	Lency Yulia, SH.	KPHP Kahayan Tengah	Pendamping KUPS Silvopastura
16	Siti Mareonita, S.Hut.	KPHP Kahayan Tengah	Koordinator Pendamping KPS LPHD Bukit Liti
17	Tri Roos Vierani	KPHP Kahayan Tengah	Pendamping KUPS Perlebahan
18	Meliani	Local champion KPHP Kahayan Tengah	Pendamping KUPS Silvofishery

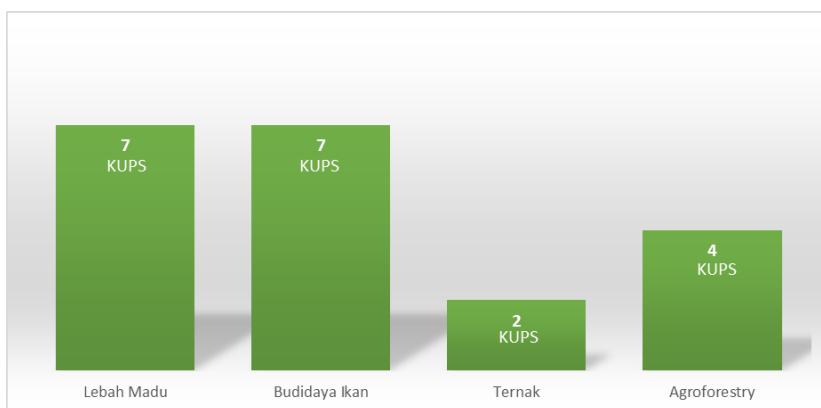
No	Nama	Instansi	Pendamping
19	Feky Rahawarin, S.Hut.	KPHP Kahayan Tengah	Koordinator Pendamping KPS MHA Barasak Desa Pilang
20	Praytino Budi Santoso	KPHP Kahayan Tengah	Pendamping KUPS Agroforestry & Lebah Madu Kalulut Pambulan
21	Arya Prima Yuda Wijaya	Local champion KPHP Kahayan Tengah	Pendamping KUPS Silvofishery Barasak
22	Indah Puspita, S.Hut.	KPHP Kahayan Tengah	Koordinator Pendamping KPS LPHD Pilang
23	Hj. Nanie, A.Md	KPHP Kahayan Tengah	Pendamping KUPS Perikanan "Karya Bersama"
24	Rilya Setia Faturahman	KPHP Kahayan Tengah	Pendamping KUPS Budidaya Kelulut "Eka Bahuroi"
25	Depi Natalia, S.Hut., M.P.	KPHP Kahayan Tengah	Koordinator Pendamping KPS LPHD Penda Barania
26	Lingga Yudha	Local champion KPHP Kahayan Tengah	Pendamping KUPS Agrosilvofishery
27	Emilia Luni	Local champion KPHP Kahayan Tengah	Pendamping KUPS Silvopastura
28	Sopha Yulina, S.Hut.	KPHP Kahayan Tengah	Koordinator Pendamping KPS LPHD Henda
29	Mersilia Crenatta, S.Hut.	KPHP Kahayan Tengah	Pendamping KUPS Agroforestry Kahanjak Henda
30	Joanz Milaifius Fernando	Local champion	Pendamping KUPS HHBK Henda Sejahtera

Gambar 3.16. Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sasaran pendampingan PEN 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah.



Keterangan Peta KPS dan KUPS Sasaran PEN 2021 :

Kode Lokasi	Uraian
1	KPS Pelita Muda terdiri dari KUPS Agroforestry "Itah Tempon Gawi" dan KUPS Perikanan "Maju Makmur"
2	KPS LPHD Parahangan terdiri dari KUPS HHBK Lebah kelulut dan KUPS Silvopastura
3	KPS LPHD Bukit Liti terdiri dari KUPS Perlebahan dan KUPS Silvofishery
4	KPS LPHD Penda Barania terdiri dari KUPS Agrosilvofishery dan KUPS Silvopastura
5	KPS LPHD Tanjung Taruna terdiri dari KUPS Taruna Mandiri dan KUPS Taruna Bersatu
6	KPS LPHD Pilang terdiri dari KUPS Perikanan "Karya Bersama" dan KUPS Budidaya Kelulut "Eka Bahuroi"
7	KPS MHA Barasak terdiri dari KUPS Agroforestry & Lebah Madu Kalulut Pambulan dan KUPS Silvofishery Barasak
8	KPS LPHD Henda terdiri dari KUPS Agroforestry Kahanjak Henda dan KUPS HHBK Henda Sejahtera



Gambar 3.17. Grafik Komoditas Usaha yang diusahakan oleh masing-masing KUPS.

Kegiatan pendampingan dilakukan selama 5 (lima) bulan dimulai dari Juni sampai dengan Oktober 2021. Dalam pelaksanaan kegiatan PEN Tahun 2021 ini tahapan pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi beberapa tahapan, yang terdiri dari; 1) Perencanaan dan Persiapan Kegiatan, 2) Pelaksanaan Pendampingan, 3) Supervisi dan Asistensi, 4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

1) Perencanaan dan Persiapan Kegiatan

Meliputi kegiatan penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan PEN, dan penyusunan pedoman pendampingan.

2) Pelaksanaan Pendampingan

Meliputi pendampingan penguatan kelembagaan kelompok, pendampingan pelaksanaan kegiatan pangan agroforestry dan alat ekonomi produktif, serta pendampingan dalam membuka akses pengembangan usaha dengan melibatkan peran berbagai pihak. Pada tahapan pelaksanaan pendampingan, pendamping melakukan kegiatan pendampingan di 20 KUPS yang tersebar di 10 KPS.

3) Supervisi dan Asistensi

Supervisi dilakukan untuk melihat dan meninjau sejauhmana kegiatan pendampingan yang sudah dilakukan di kelompok sasaran. Supervisi juga bertujuan untuk membimbing, memantau, inventarisasi permasalahan pada waktu pendampingan untuk selanjutnya di cari solusi dan pemecahan terhadap permasalahan yang ditemui. Asistensi bagi pendamping dilakukan setiap 1 bulan sekali secara online dan onsite yang dibuat sebagai wadah bagi pendamping untuk sharing informasi dan konsultasi. Narasumber pada kegiatan asistensi ini berasal

dari berbagai pihak baik akademisi maupun praktisi yang sudah kompeten di bidang masing-masing. Asistensi ini difokuskan pada kelompok usaha yang dikembangkan oleh KUPS dengan kelompok usaha sebagai berikut: 1) Agroforestry, 2) Budidaya Lebah Kelulut, 3) Budidaya ikan, dan 4) Peternakan. Selain Asistensi online, dilakukan juga asistensi onsite yang dilakukan langsung di lokasi usaha para narasumber sesuai komoditas yang diusahakan.

4) Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pendampingan dilakukan oleh pendamping dalam mendampingi kelompok ditingkat tapak yang kemudian dituangkan dalam laporan kunjungan dan laporan bulanan yang disampaikan setiap bulannya. Pada akhir kegiatan juga dilakukan evaluasi dari pendamping maupun dari KPS dan KUPS. Hasil evaluasi menunjukkan hampir semua kelompok menginginkan kegiatan ini berlanjut untuk tahun-tahun depannya dan kegiatan pendampingan tetap terus dilaksanakan karena KPS dan KUPS masih sangat butuh pendamping dalam mendampingi kegiatan di kelompok. Kegiatan PEN ini untuk selanjutnya agar terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya pada kelompok-kelompok yang benar-benar memerlukan fasilitasi dan pendampingan intensif.

Dari hasil kegiatan PEN yang sudah dilakukan di KPS dan KUPS, sampai akhir kegiatan sudah banyak kelompok yang merasakan manfaat dari kegiatan yang sudah mereka rencanakan dan mereka lakukan. Salah satu contoh, budidaya kelulut yang mereka budidayakan sudah mulai menghasilkan, ada kelompok yang sudah mulai panen madu dari kelulut yang mereka budidayakan, ada pula yang dikembangkan menjadi stup-stup baru sehingga hal ini sangat berdampak bagi ekonomi anggota kelompok.

Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan/pendamping handal melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional Provinsi Kalimantan Tengah yang melibatkan 30 orang tenaga pendamping di 20 KUPS yang tersebar di 10 KPS selama 5 (lima) bulan dapat terlaksana dengan baik dengan total aloaksi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 999.031.658,- atau 99,90%.



Baglog yang mulai ditumbuhi jamur
Hasil inokulasi bibit jamur
KTH Ngudi Lestari, Kab. Rembang.

7. Pembentukan dan Pembinaan KTH Mandiri

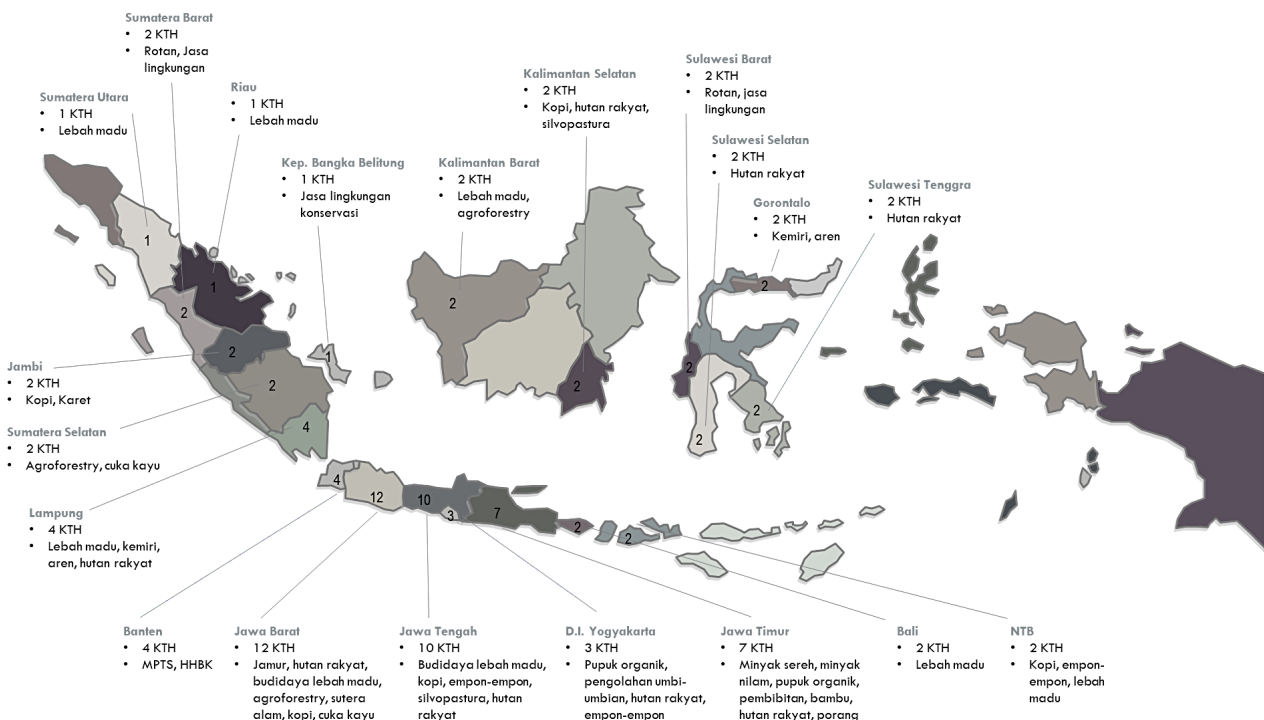
a. Pendampingan kelompok tani desa-desa hutan menuju KTH Mandiri

Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) mempunyai klasifikasi yang terdiri dari kelas Pemula, kelas Madya dan kelas Utama. Klasifikasi KTH digunakan sebagai dasar pembinaan untuk peningkatan kemampuan dan kemandirian KTH. Adapun pengertian KTH mandiri yaitu KTH yang meningkat kelasnya dari kelas Madya menjadi Utama. KTH Mandiri diukur dari kemampuan KTH dalam mengelola kelembagaan, mengelola kawasan dan mengelola usaha.

Tahun 2021 target pembentukan KTH Mandiri yaitu 65 unit KTH Mandiri. Target tersebut telah tercapai 100% dimana 65 KTH telah difasilitasi menjadi KTH Mandiri hingga

Desember 2021. KTH yang difasilitasi tersebar di 20 provinsi dengan berbagai komoditas yang diusahakan yaitu: madu, porang, jamur tiram, kopi, cuka kayu, pengolahan kemiri, aren, kerajinan bambu, persuteraan alam, rotan, pupuk organik, jasa lingkungan dan produk HHBK lainnya.

Berdasarkan Untuk mengetahui dampak pemberian fasilitasi KTH Mandiri dilakukan evaluasi dengan tiga metode, yaitu kunjungan lapangan terhadap 14 KTH di 4 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DIY), evaluasi secara virtual terhadap seluruh KTH Mandiri, dan kuesioner evaluasi dampak kegiatan fasilitasi KTH. Berdasarkan hasil kuesioner evaluasi dampak kegiatan fasilitasi KTH terhadap 45 KTH dari 65 KTH penerima fasilitasi, rata-rata KTH mengalami kenaikan produksi sebesar 111,69% dan kenaikan omzet rata-rata sebesar 76,54% berkisar antara Rp. 1.400.000 - Rp. 924.000.000. Karena kondisi pandemi ada pula KTH yang mengalami penurunan omzet terutama KTH yang bergerak dibidang usaha jasa wisata, karena adanya penurunan jumlah pengunjung.



Gambar 3.18. Jumlah KTH Mandiri pada Setiap Provinsi dan Komoditas yang Dikembangkan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan, secara umum kegiatan KTH Mandiri telah memberikan dampak yang positif pada pengembangan KTH. Secara kelola kelembagaan, pembuatan akta notaris membuat legalitas KTH menjadi lebih kuat. Disamping itu dapat membangun kepercayaan stakeholders terhadap KTH dan membuka peluang adanya kerjasama atau kemitraan dengan pihak terkait. Dari segi kelola usaha, meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan usaha melalui pengurusan perijinan produk (PIRT, sertifikat halal, dan BPOM, dll). Selain itu, dapat menambah sarana peningkatan kualitas dan kuantitas usaha/produksi, serta menambah sarana kualitas dan kuantitas pasca panen, sehingga meningkatkan pendapatan KTH.

Kegiatan KTH Mandiri secara umum dapat berjalan dengan lancar, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain keterlambatan KTH dalam pemenuhan syarat-syarat administrasi pencairan anggaran dan pembayaran pajak. Situasi dan kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda dan dilakukan secara virtual diantaranya pertemuan kelompok dan sosialisasi yang mengumpulkan banyak orang untuk pemenuhan syarat-syarat administrasi izin produk KTH.

Pagu Anggaran kegiatan Pendampingan kelompok tani desa-desa hutan menuju KTH Mandiri yaitu Rp.1.435.500.000,- , realisasi anggaran kegiatan yaitu Rp.1.435.482.505,- atau 99,99%.

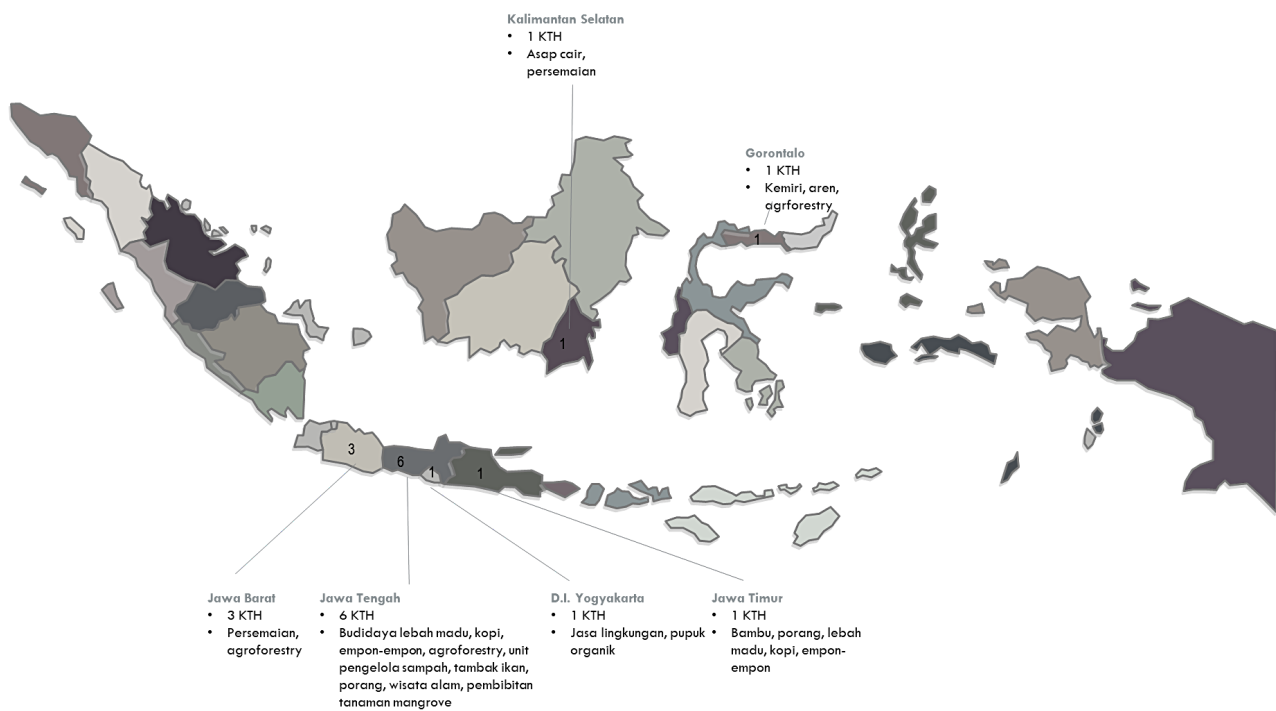
8. Pembentukan dan Pengembangan LP2UKS (Wanawiyata Widyakarya)

a. Fasilitas Pembentukan Wanawiyata Widyakarya

Fasilitas pembentukan LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya diberikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) yang memiliki kegiatan usaha produktif bidang kehutanan dan lingkungan hidup dan memiliki potensi untuk dapat memberikan pelatihan dan pemagangan usaha produktif yang dilakukannya kepada masyarakat atau KTH lainnya. Calon KTH yang akan difasilitasi memiliki SDM yang mampu menjadi fasilitator atau narasumber untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman usahanya serta memiliki sarana prasarana yang memadai. Pengalaman KTH sebagai lokasi studi banding maupun pelatihan bagi masyarakat menjadi nilai lebih untuk dapat menerima fasilitas pembentukan Wanawiyata Widyakarya.

Target tahun 2021 yaitu pembentukan 13 unit KTH menjadi LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya. Target tersebut telah tercapai 100% dimana terdapat 13 KTH telah difasilitasi pembentukan LP2UKS hingga akhir tahun 2021. Fasilitas ini diberikan kepada 13 KTH yang tersebar di 6 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Gorontalo dengan usaha dan komoditas antara lain persemaian, agroforestri, wisata alam, budidaya lebah madu, kopi, porang, pengelolaan sampah, tambak ikan, bambu, kemiri dan sebagainya. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar...

Evaluasi dalam rangka mengetahui manfaat dan dampak yang diperoleh KTH setelah menerima fasilitas Pembentukan Wanawiyata Widyakarya juga dilakukan pada akhir tahun 2021. Hasil evaluasi terhadap 9 dari 13 KTH penerima fasilitas secara umum telah menunjukkan manfaat dan dampak yang positif terhadap perkembangan KTH diantara rentang waktu sebelum dan setelah diberikan fasilitas.



Gambar 3.19. KTH penerima fasilitasi pembentukan LP2UKS beserta komoditas yang diusahakannya.

Pasca menerima fasilitasi, KTH mengalami peningkatan kunjungan pelatihan/pemagangan dari rata-rata 9 kunjungan/tahun menjadi 12 kunjungan/tahun. Sedangkan rata-rata kenaikan pendapatan KTH dari kunjungan pelatihan berkisar dari Rp. 2.000.000 - Rp. 30.000.000. Jumlah peserta pelatihan yang telah mengembangkan usaha dari pelatihan pemagangan bervariasi, rata-rata untuk setiap KTH berkisar 20 - 30 orang (2 - 3 kelompok). Terdapat juga KTH yang belum menghasilkan wirausaha baru. Hasil perhitungan dampak ini tidak terlepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan *social distancing* sehingga kunjungan masyarakat ke Wanawiyata Widyakarya selama tahun 2021 belum optimal.

Dari hasil monitoring kegiatan fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widyakarya ini, sebagian besar permasalahan dihadapi oleh kelompok yaitu pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal, mengalami pengunduran waktu dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan pertemuan dan kunjungan.

Pagu Anggaran kegiatan Pendampingan kelompok tani desa-desa hutan menuju KTH Mandiri yaitu Rp.449.065.000,- , realisasi anggaran kegiatan yaitu Rp.448.712.475,- atau 99,92%.

b. Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya

Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) atau yang biasa disebut Wanawiyata Widyakarya dilakukan untuk mengoptimalkan pendayagunaan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya yang telah ditetapkan agar menjadi lembaga pelatihan dan pemagangan yang mampu mengelola dan mendayagunakan sumber daya pelatihan secara optimal dengan menerapkan program pelatihan yang berbasis kompetensi, memiliki sarana dan prasarana yang terstandar, serta memiliki fasilitator atau instruktur yang kompeten. Pengembangan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya meliputi kegiatan pengembangan usaha berbasis komoditas kelompok, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelatihan/pemagangan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola.

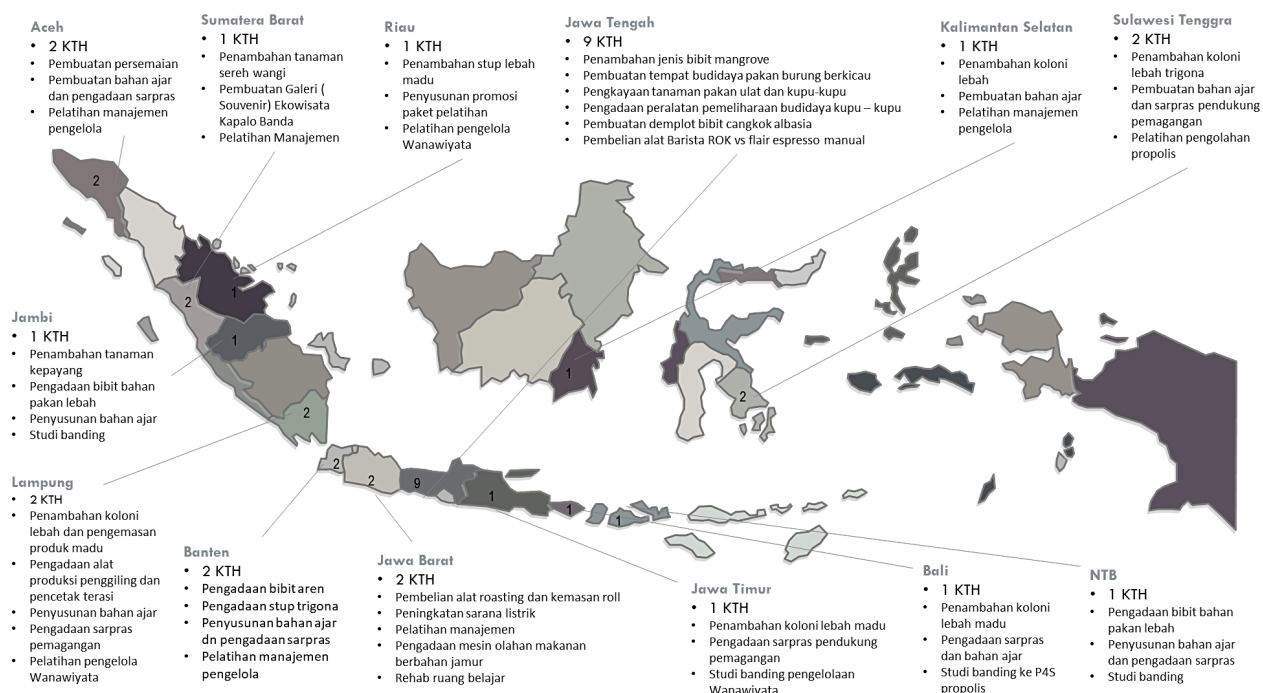
Pada tahun 2021 target pengembangan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya dilakukan terhadap 25 KTH yang telah ditetapkan menjadi LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya. Target tersebut tercapai 100% dengan dilaksanakannya pengembangan terhadap 25 Wanawiyata Widyakarya yang tersebar di 13 Provinsi.

Hasil monitoring terhadap 8 KTH penerima fasilitasi pengembangan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya menunjukkan bahwa hanya terjadi peningkatan omzet pada satu KTH dengan usaha pupuk organik, sedangkan KTH lainnya tidak menunjukkan peningkatan omzet. Hal ini patut dimaklumi karena fasilitasi diterima pada tahun berjalan sehingga belum terlihat dampak peningkatan omzet. Dilihat dari segi peningkatan kunjungan pelatihan/pemagangan ke Wanawiyata Widyakarya rata-rata terdapat sebanyak 4 kunjungan per tahunnya. Adapun dampak terhadap pembentukan wirausaha baru, untuk setiap KTH bervariasi, sebagai contoh KTH Meohai yang berlokasi di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe

Selatan, Sulawesi Tenggara yang telah mendorong 4 KTH mengembangkan usaha budidaya lebah madu dari hasil pelatihan/pemagangan di KTHnya.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya adalah adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan perencanaan kegiatan berjalan kurang optimal. Selain itu sebagian SDM Wanawiyata Widyakarya dan penyuluh kehutanan pendamping kurang berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi, terutama pada sisi pertanggungjawaban administrasi kegiatan.

Pagu Anggaran kegiatan Pendampingan kelompok tani desa-desa hutan menuju KTH Mandiri yaitu Rp.743.350.000,- , realisasi anggaran kegiatan yaitu Rp.742.933.295,- atau 99,94%.



Gambar 3.20. KTH penerima fasilitasi pengembangann LP2UKS.

c. Penyusunan Kurikulum Pemagangan Wanawiyata Widyakarya

Lembaga Pelatihan Dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang selanjutnya disebut Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha di bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya.

Dalam rangka mengoptimalkan dan mendayagunakan Wanawiyata Widyakarya yang telah ditetapkan, menjadi lembaga yang kredibel, *acceptable* dan mandiri, maka Wanawiyata Widyakarya perlu dikembangkan menjadi lembaga yang memiliki manajemen yang mampu mengelola dan mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal dengan menerapkan program magang yang berbasis kompetensi, memiliki sarana dan prasarana yang berstandar, serta memiliki fasilitator atau instruktur yang kompeten. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Wanawiyata Widyakarya harus mempunyai materi-materi pemagangan untuk disampaikan kepada peserta magang dan pedoman penyelenggaraan pemagangan. Agar Wanawiyata Widyakarya mempunyai dasar dalam menyusun materi pemagangan maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Kurikulum Wanawiyata Widyakarya dan Pedoman Penyelenggaraan Pemagangan di Wanawiyata Widyakarya.

Pusat Penyuluhan membentuk tim penyusun yang terdiri dari Pejabat Struktural Bidang Kelembagaan dan Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan pada Pusat Penyuluhan. Tim Penyusun Pedoman Penyusunan Kurikulum Pemagangan Wanawiyata Widyakarya ditetapkan melalui Surat Perintah Tugas Kepala Pusat Penyuluhan Nomor: PT.26/LUH/KP/WAS.1/8/2021 tanggal 16 Agustus 2021. Dalam menyusun pedoman, tim mengumpulkan bahan dari berbagai sumber diantaranya mengumpulkan bahan melalui media online, buku-buku/jurnal yang berkaitan dan dari ketua Wanawiyata Widyakarya penerima fasilitasi pengembangan Wanawiyata Widyakarya tahun 2021.

Adapun materi yang tersedia dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum Wanawiyata Widyakarya yaitu Budidaya Lebah *Apis cerana*, Budidaya Lebah *Apis Melifera*, Budidaya *Trigona sp.*, Wisata Alam, Pelestarian & Budidaya Mangrove, Minyak Atsiri Sereh Wangi, Pengembangan Minyak Kepayang, Budidaya Burung Jalak Suren, Konservasi Kupu-Kupu, Konservasi Anggrek, Kopi, Kerajinan Anyaman Pandan, Kerajinan/Souvenir Limbah Plastik & Kertas, Aren, Jamur Tiram dan Agroforestry. Sedangkan pada Pedoman Penyelenggaraan Pemagangan di Wanawiyata Widyakarya berisi tentang uraian penyelenggaraan Pemagangan meliputi Perencanaan kegiatan pemagangan, Pelaksanaan kegiatan pemagangan, Promosi kegiatan Pemagangan dan Evaluasi kegiatan pemagangan.

Pagu Anggaran kegiatan Penyusunan Kurikulum Pemagangan Wanawiyata Widyakarya yaitu Rp.93.600.000,- , realisasi anggaran kegiatan yaitu Rp.93.446.750,- atau 99,84%.



9. Metode Materi Penyuluhan

a. Sekolah Lapang

Sekolah lapangan sebagai salah satu metode penyuluhan dalam upaya meningkatkan kemandirian petani. Pola sekolah lapangan dirancang sedemikian rupa sehingga kesempatan belajar petani terbuka selebar-lebarnya agar para petani berinteraksi dengan realita mereka secara langsung, serta menemukan sendiri ilmu dan prinsip yang terkandung di dalamnya.

Pada tahun 2021, Pusat Penyuluhan melaksanakan kegiatan Sekolah Lapangan dengan tema Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam di KTH Sukamekar yang berlokasi di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Tujuan dilaksanakannya sekolah lapangan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan KTH dalam melakukan pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, Meningkatnya usaha KTH dalam upaya meningkatkan perekonomian KTH melalui pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, dan terbangunnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam/hutan secara berkelanjutan melalui usaha produktif bidang kehutanan.

Sebelum dilaksanakan sekolah lapangan, areal KTH Sukamekar merupakan hamparan lahan yang berisi kombinasi tanaman hutan dan tanaman pertanian. Usaha produktif yang dikembangkan oleh KTH Sukamekar pada awalnya adalah usaha tanaman pertanian yang dikembangkan di lahan masing-masing anggota KTH pada areal seluas 70 hektar. Selama berlangsungnya sekolah lapangan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, KTH Sukasirna mengembangkan unit usaha wisata alam yang diberi nama "Pesona Sagatan Jonggol" sebagai sarana wisata alam dan edukasi bagi masyarakat kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dan sekitarnya.



Adapun tahap pelaksanaan sekolah lapangan yaitu : (1) identifikasi dan pengumpulan calon lokasi SL, (2) bimbingan teknis bagi fasilitator dan kader SL, (3) pelaksanaan pertemuan besar, (4) pendalaman materi mandiri (PMM), (5) *field trip*, (6) *field day*, (7) monitoring dan evaluasi.

Kegiatan Sekolah Lapangan di KTH Sukamekar dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif peserta sekolah lapangan. Rata-rata kehadiran peserta sekolah lapangan dalam pertemuan umum adalah 92% sedangkan kehadiran peserta sekolah lapangan dalam pendalaman materi mandiri adalah 94%.

Monitoring dan evaluasi kegiatan Sekolah Lapangan dilakukan dengan metode *ballot box* terhadap 20 orang peserta. Pada pre tes secara keseluruhan nilai yang diperoleh adalah 33,5%. Kemudian pada akhir kegiatan dilakukan post test dan nilai yang diperoleh 39,5%. Dari hasil pre test dan post test terdapat peningkatan nilai sebesar 6%. Namun, nilai tersebut masih jauh dari target yang diharapkan yakni 70%.

Pagu anggaran Sekolah Lapangan tahun 2021 sebesar Rp.267.444.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir bulan Desember 2021 sebesar Rp.267.439.900,- atau (99,99%).

Pelaksanaan Sekolah Lapangan Tahun 2021 berjalan dengan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat walaupun tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Hal ini terjadi karena ada lonjakan kasus COVID-19.

b. Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2021



Lomba Wana Lestari adalah salah satu metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menetapkan perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah yang berprestasi dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui mekanisme penilaian tertentu. Sedangkan Apresiasi Wana Lestari adalah suatu kegiatan pemberian penghargaan dari pemerintah kepada perorangan, kelompok, aparatur pemerintah atau badan usaha atas prestasi yang dicapai berdasarkan inisiatif dan partisipatif dalam menjalankan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

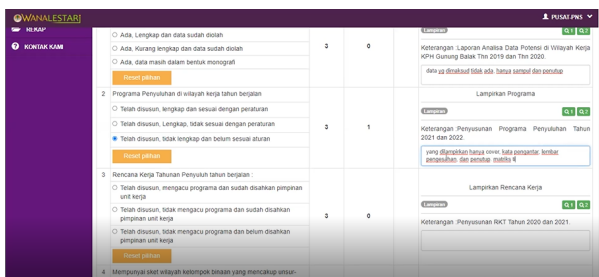
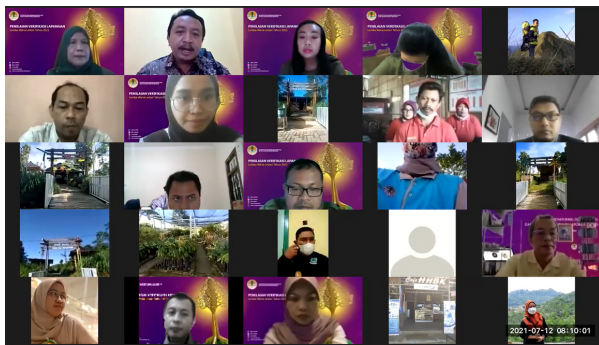
Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Wana Lestari tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari. Lomba dan Apresiasi Wana Lestari dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat nasional.

Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Wana Lestari dimaksudkan untuk mengetahui dan menetapkan perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah yang berprestasi dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui mekanisme penilaian tertentu. Tujuannya yaitu

memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah yang telah berperan aktif dan peduli dalam berbagai kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, serta untuk meningkatkan motivasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada tahun 2021, penghargaan lomba diberikan terhadap 8 (delapan) kategori, terdiri dari kategori lomba yang menjadi tanggung jawab BP2SDM yaitu kategori Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), dan Kelompok Tani Hutan (KTH), serta kategori yang menjadi tanggung jawab Ditjen PSKL yaitu Kader Konservasi Alam (KKA), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Masyarakat Pemegang izin Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), dan Pengelola Hutan Desa (PHD), Pengelola Hutan Adat (PHA). Selain delapan kategori lomba tersebut, diberikan juga apresiasi terhadap kategori Polisi Kehutanan (Polhut) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menjadi tanggung jawab Ditjen GAKUM, serta Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang menjadi tanggung jawab Ditjen PPI. Penilaian apresiasi dilaksanakan oleh masing-masing Eselon I Penanggung Jawab.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari, Penilaian Lomba Wana Lestari dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat Kabupaten/Kota/UPTD, Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2021, terdapat 14 provinsi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan lomba wana lestari tingkat nasional, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Bali.



Adapun tahapan penetapan pemenang lomba wana lestari tingkat nasional, yaitu :

- Pengiriman dokumen Juara I Tingkat Kabupaten/ Kota oleh UPTD Kabupaten/ Kota kepada Dinas Kehutanan/ LHK Provinsi secara manual.
- Pengiriman Dokumen Juara I Tingkat Provinsi oleh Dinas Kehutanan/ LHK Provinsi kepada Pusat Penyuluhan secara online system melalui Aplikasi Lomba Wana Lestari
- Pengunduhan dokumen Juara I Tingkat Provinsi oleh tim Administrator Pusat.
- Verifikasi Dokumen. Dilaksanakan oleh masing-masing Eselon I Penanggung Jawab kategori lomba.
- Verifikasi Lapangan. Sehubungan dengan melonjaknya kasus Covid-19 dan ditetapkan nyakebijakan PPKM, maka verifikasi lapangan dilaksanakan secara virtual.
- Hasil verifikasi lapangan kategori lomba BP2SDM disampaikan kepada Kepala Badan penyuluhan dan Pengembangan SDM
- Hasil penilaian tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai penerima penghargaan Lomba Wana Lestari Tahun 2021.

- Penerima penghargaan lomba dan apresiasi wana lestari ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.449/MENLHK/P2SDM/SDM.0/8/2021 tentang Penerima Penghargaan Pemenang Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2021 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.450/MENLHK/P2SDM/SDM.0/8/2021 tentang Penerima Penghargaan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2021.

Pagu Anggaran Kegiatan Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2021 yaitu Rp. 77.270.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.258.000 atau sebesar 99,98%. Dalam kegiatan ini ditemukan permasalahan diantaranya, yaitu beberapa provinsi tidak mempunyai anggaran untuk kegiatan lomba, sehingga tidak dapat berpartisipasi pada Lomba Wana Lestari tahun 2021. Kemudian. beberapa administrator provinsi masih belum memahami tata cara penginputan dokumen Juara I Tingkat Provinsi secara online pada Aplikasi Lomba Wana Lestari. Serta, kegiatan verifikasi lapangan tidak bisa dilaksanakan secara faktual dikarenakan melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia. Sebagai saran, untuk kelancaran penyampaian dokumen Juara I Provinsi secara online melalui Aplikasi Wana Lestari, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM Administrator Provinsi dan perlu ditingkatkan juga sarana prasarana pendukungnya.

c. Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2021

Pemberian Penghargaan kepada Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2021 merupakan salah satu wujud ungkapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah atas prestasi, kinerja dan darmabakti dalam pembangunan lingkungan



hidup dan kehutanan. Mempertimbangkan kondisi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh Presiden RI Joko Widodo, kegiatan pemberian penghargaan oleh Menteri LHK yang semula rencananya akan dilaksanakan secara faktual dengan rangkaian kegiatan sebagaimana tahun sebelumnya, kini dilaksanakan secara *hybrid*, terpusat di Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti dan *live* pada Youtube Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba Wana Lestari, yaitu Penyuluh Kehutanan PNS, Kelompok Tani Hutan (KTH), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Kader Konservasi Alam (KKA), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), serta Pengelola Hutan Adat. Dan juga memberikan apresiasi kepada masyarakat/aparatur pemerintah yang telah berperan aktif dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu Polisi Kehutanan (POLHUT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Pemberian Penghargaan kepada Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2021 dilaksanakan secara virtual melalui Aplikasi Zoom Cloud Meeting dan *live* pada Youtube Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta secara faktual di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021.

Penerima penghargaan Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2021 berjumlah 45 orang, terdiri dari 33 orang pemenang lomba dan 12 orang penerima apresiasi. Bentuk dan besaran penghargaan kepada pemenang lomba wana lestari diberikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nomor P.10/P2SDM/SET/KUM.1/7/2017 tanggal 31 Juli 2017.

Berdasarkan arahan Menteri LHK pada kegiatan pemberian penghargaan, pemenang kategori lomba juga memperoleh hadiah lain berupa kendaraan roda dua. Kendaraan roda dua tersebut diberikan atas dukungan PT. Fajar Surya Wisesa (Fajar Paper) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa 33 unit sepeda motor untuk pemenang lomba.



Kasus Covid-19 yang berdampak pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga para pemenang tidak dapat diundang ke Jakarta dan diberikan penghargaan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara langsung/faktual. Selain itu, pemberian penghargaan secara virtual sangat rentan terhadap gangguan teknis seperti ketersediaan sinyal internet para pemenang. Pelaksanaan pemberian penghargaan tahun selanjutnya diharapkan dapat menghadirkan para pemenang pada acara kenegaraan sebagai bentuk apresiasi yang lebih atas pencapaian dan usaha yang telah ditempuh untuk pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Pagu Anggaran Kegiatan Temu karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2021 yaitu Rp. 338.406.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 338.403.531 atau sebesar 99,99%.

d. Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik

Dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan diperlukan pendampingan agar masyarakat memahami secara benar program, kebijakan dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Pendampingan memiliki arti aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus oleh para pendamping baik terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) atau kelompok masyarakat. Pada tahun 2021 Pusat Penyuluhan menerbitkan materi-materi publikasi melalui media cetak berupa poster dan media elektronik seperti media sosial, website, aplikasi tematik (SIMLUH, SIMPING, Cybex, Forestamart dan aplikasi Wana Lestari), serta kegiatan webinar virtual series dan kegiatan COP-26 UNFCCC.

MEDIA CETAK Poster



Pada tahun 2021, Pusat Penyuluhan menerbitkan media cetak berupa poster yang mengenalkan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Pusat Penyuluhan kepada kelompok tani hutan, yaitu Wanawiyata Widyakarya.

MEDIA ELEKTRONIK Website Pusat Penyuluhan

Ingin Usaha Aren Berhasil? Mari Belajar dari Petani Aren
24/03/2021 - Kategori : Artikel Pusluh



Ingin Usaha Aren Berhasil? Mari Belajar dari Petani Aren

Unduh Lampiran : [artikel-tto-aren-website.pdf](#)

Tulisan terkait :

Pusat Penyuluhan memiliki website yang dapat diakses melalui alamat <http://pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id/>. Website

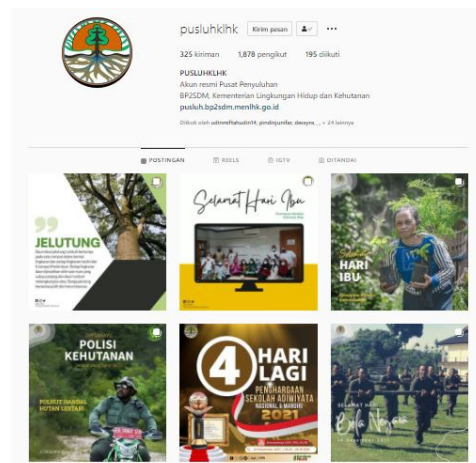
Pusat Penyuluhan berisi publikasi kegiatan penyuluhan seperti berita-berita terkini mengenai kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Pada tahun 2021, informasi yang telah dipublikasikan di website Pusat Penyuluhan berjumlah 18 artikel.

Cyber Extension



Cyber Extension (Cybex) merupakan aplikasi tematik berisi materi-materi penyuluhan yang terintegrasi dengan website Pusat Penyuluhan. Pada tahun 2021 Pusat Penyuluhan mempublikasikan dua buku, yaitu Majalah Kenari Edisi Tahun 2021 dan Katalog Penerima Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya.

Media Sosial Pusat Penyuluhan



Media sosial merupakan salah satu sarana untuk penyebarluasan informasi yang efisien. Pusat Penyuluhan melalui beberapa platform media sosial pada tahun 2021 telah melakukan penyebarluasan informasi terkait penyuluhan, diantaranya Pusat Penyuluhan telah mengunggah 154 post di Instagram, 50 post di Twitter, 121 post di Facebook dan 9 video di YouTube.

Aplikasi SIMLUH



SIMLUH berisi keterpaduan data kelembagaan, Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Penyuluh Kehutanan Swasta, kelompok tani hutan, dan sarana prasarana penyuluhan kehutanan. Aplikasi SIMLUH dapat diakses pada alamat <http://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id/>. Pada tahun 2021, dilakukan pengembangan fitur SIMLUH, diantaranya :

- Perubahan Format Rekap Penyuluh PNS Pada Halaman Data Integrasi penyuluh Kehutanan PNS
- Penambahan Filter Rekap Penyuluh PNS berdasarkan Jabatan
- Penambahan Filter Rekap Penyuluh PNS berdasarkan Golongan
- Tambahan Halaman untuk Video Panduan pada halaman login
- Tambahan Halaman untuk Dokumen Panduan (PDF) pada halaman login
- Fitur Pengumuman Berjalan pada halaman awal aplikasi
- Pada Pejabat *Approval* diberikan filter aktif dan tidak aktif.
- Fitur Download Excel Pada Data pejabat *Approval*
- Fitur Download PDF/Print Pada Data pejabat *Approval*
- Fitur Pencarian Berdasarkan Provinsi Pada data pejabat approval
- Perubahan Rekap Laporan BOP menjadi Diterima, Diterim dan Disetujui
- Fitur komentar dan mengembalikan laporan pada akun pejabat approval
- Fitur Edit data Pokok Laporan BOP pada akun Admin Pusat dan daerah
- Penambahan Notifikasi Pensiun

Aplikasi SIMPING



Sistem Informasi Pendampingan (SIMPING) merupakan aplikasi yang dikelola Pusat Penyuluhan untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pendamping dan perkembangan KTH binaan, baik KTH dengan skema Perhutanan Sosial (PS) maupun KTH non PS (Hutan Rakyat) dari sisi kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. Aplikasi SIMPING dapat diakses pada alamat <http://siping.bp2sdm.menlhk.go.id/>. Pada Tahun 2021 Pusat Penyuluhan melakukan pengembangan fitur pada aplikasi SIMPING, diantaranya:

- Fitur Non Aktif data KTH
- Penambahan kolom usia pada data penyuluh
- Export Data KTH keseluruhan pada halaman admin
- Peningkatan Fitur Keamanan Sistem dari SQL injection dan Malware
- Penambahan filter tahun pada menu SK pendampingan
- Penambahan kolom data NIK pada data pendamping
- Penambahan filter tahun pada menu Rekap SK pendampingan PS
- Integrasi dengan Gokups API

Kegiatan Virtual

Sejak diberlakukannya PPKM karena keadaan darurat pandemi COVID-19, kegiatan virtual maupun *hybrid* mulai dijadikan solusi untuk penyebarluasan informasi yang bersifat dua arah (interaktif). Selama tahun 2021, Pusat Penyuluhan telah melaksanakan 6 kegiatan virtual maupun hybrid. Diantaranya :



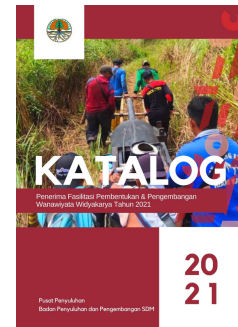
- Kiprah Srikandi Penyuluhan Kehutanan
- Pelaksanaan Kegiatan Operasionalisasi Aplikasi Lomba Wana Lestari Tahun 2021 bagi Administrator Provinsi
- Penyuluhan Tetap Bangkit Membangun Indonesia Tangguh
- Kisah Si Penyuluh Selamatkan Bumi
- Bimbingan Teknis Aplikasi SIMPING untuk Administrator Pusat
- Talkshow Penyuluhan dan Pendampingan dalam Mendukung Pengendalian Perubahan Iklim

Pagu anggaran kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik Tahun 2020 sebesar Rp.298.798.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.298.781.600,-. atau 99,99%.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyebarluasan informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik menemui beberapa permasalahan, diantaranya beberapa penyuluh kehutanan masih belum paham tentang operasionalisasi aplikasi SIMLUH dan SIMPING. Kemudian data pada Aplikasi SIMLUH dan SIMPING masih sedikit. Selain itu, publikasi pada website belum dilakukan secara konsisten di setiap bulan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik Tahun 2021 berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, terdapat progress penambahan data pada aplikasi SIMLUH dan SIMPING dibandingkan tahun sebelumnya. Publikasi kegiatan penyuluhan pada tahun 2021 lebih banyak dilaksanakan melalui media elektronik, yaitu website, aplikasi tematik, media sosial Pusat Penyuluhan dan kegiatan virtual.

e. Penerbitan Majalah Kenari



Tahun 2021 Pusat Penyuluhan menerbitkan satu Edisi Majalah Komunikasi Edukasi Wana Lestari (Kenari) dalam bentuk cetak dan bentuk elektronik yang diunggah pada Cyber Extension Pusat Penyuluhan. Majalah Kenari Edisi Tahun 2021 mengusung tema "Peran Penyuluhan Kehutanan dalam Mendukung Isu-isu Strategis Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Selain itu, Pusat Penyuluhan juga menerbitkan Katalog Penerima Fasilitas Pembentukan & Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2021. Katalog ini berisi profil kelompok-kelompok yang mendapatkan fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widyakarya tahun 2021 (13 kelompok) dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya tahun 2021 (25 kelompok).

Penerbitan Majalah Kenari 2021 dimaksudkan sebagai media informasi bagi Penyuluh Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan di lapangan. Adapun tujuannya yaitu menyediakan sarana pengembangan profesi jabatan fungsional bagi Penyuluh Kehutanan untuk menuangkan ide/tulisan serta memudahkan Penyuluh Kehutanan dalam mengakses bahan materi penyuluhan.

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan penerbitan majalah Kenari tahun 2021 yaitu Majalah Kenari yang dicetak dalam bentuk hardcopy jumlahnya belum memadai, hal ini mengakibatkan pendistribusian majalah tidak merata. Upaya pemecahan masalah yang dapat dilakukan yaitu Majalah Kenari dalam bentuk elektronik diunggah pada Cyber Extension Pusat Penyuluhan dan bisa diakses oleh Penyuluh Kehutanan seluruh Indonesia. Terdapat

permasalahan pula pada artikel kiriman dari daerah banyak yang tidak sesuai dengan tema Kenari maupun artikel yang ada di Kenari serta waktu koreksi artikel yang membutuhkan waktu lama mengingat artikel yang dimuat cukup banyak. Sehingga upaya pemecahan masalahnya dengan evaluasi lebih lanjut terhadap jadwal penyusunan Majalah Kenari 2021. Ditinjau dari segi anggaran, realisasi kegiatan pada tahun ini adalah sebesar Rp.95.432.000,- dari pagu Rp.95.432.000,- atau 100%.



Asisten Pendampingan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
di KTH Lima Bersaudara, Palangkaraya.

BAB IV

PENUTUP

PENUTUP

Laporan Tahunan Pusat Penyuluhan Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Pusat Penyuluhan selaku penanggungjawab kegiatan peningkatan penyuluhan. Laporan ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan Pusat Penyuluhan selama tahun 2021.

Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan pada Tahun 2021 yang tercantum dalam DIPA sebesar Rp.17.010.098.000,- dan realisasi anggaran yang tercapai pada tahun 2021 sebesar Rp.17.005.634.383,- atau 99,97%. Capaian realisasi fisik kegiatan telah melebihi 100% dikarenakan terdapat kegiatan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Berbasis Komoditas yang dilaksanakan secara online dengan realisasi melebihi target yang ditetapkan.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yaitu adanya situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan tata laksana dan strategi pencapaian output kegiatan. Terkait hal tersebut, Pusat Penyuluhan melakukan langkah-langkah tindak lanjut, yaitu:

1. Penghematan anggaran belanja perjalanan dinas dan rapat di luar kantor untuk mempertahankan kegiatan yang terkait dengan belanja masyarakat seperti fasilitasi KTH Mandiri, Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya (LP2UKS).
2. Perubahan metode pelaksanaan kegiatan pertemuan yang semula dilaksanakan secara tatap muka langsung menjadi pertemuan virtual dengan memanfaatkan *Learning Management System* (LMS) dan teknologi dalam jaringan lainnya dalam rangka mematuhi aturan pemerintah terkait *physical distancing* dan menjaga protokol kesehatan.
3. Melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan yang tertunda karena masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 dan melakukan pemantauan perkembangannya dengan memanfaatkan akses teknologi yang memungkinkan untuk berkomunikasi jarak jauh.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Tahunan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak mengenai tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan. Secara internal Laporan Tahunan ini merupakan evaluasi pencapaian hasil kegiatan penyuluhan kehutanan baik fisik maupun keuangan sebagai bahan masukan untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan di masa mendatang.



BP2SDM
KLHK

SCAN ME!



pusluhklhk



@pusluhklhk



@pusluhklhk



pusat penyuluhan



www.pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id